

URUSAN OTONOMI DAERAH, PEMERINTAH UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN

1. BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK JAWA TIMUR.

1) Program Peningkatan Kerukunan Umat Beragama

a) Tujuan

Program ini bertujuan untuk menciptakan kerukunan antar umat beragama

b) Sasaran

Tokoh agama

c) Pagu dan Realisasi

Program Peningkatan Kerukunan Umat Beragama dengan total anggaran sebesar Rp 1.080.000.000,00 dengan realisasi Rp. 1.067.634.250,00 (98,86%) yang secara rinci per kegiatan dapat dilihat pada Lampiran (Matrik 11 Kolom).

d) Hasil Pelaksanaan

Terciptanya kerukunan antar umat beragama sebanyak 200 orang

Meningkatnya solidaritas antar umat beragama sebanyak 260 orang

e) Permasalahan dan Upaya Pemecahannya

Permasalahan

- Pemahaman agama belum sepenuhnya terealisasi dalam kehidupan sehari-hari
- Belum maksimalnya hubungan hubungan social keagamaan dan lembaga pendidikan keagamaan .
- Belum teratasinya kesenjangan social ekonomi.

Upaya Pemecahan Permasalahan

- Meningkatkan kualitas pelayanan dan pemahaman agama serta kehidupan berbangsa masyarakat di Jawa Timur;
- Meningkatkan jaringan kerjasama dan sistim informasi lembaga sosial keagamaan dan lembaga pendidikan keagamaan di Jawa Timur;
- Meningkatkan hubungan dan dialog antar kelompok masyarakat yang berdimensi suku, Agama, Ras dan antar golongan (sara)

2. BIRO PEMERINTAHAN UMUM PROVINSI JAWA TIMUR

1) Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah.

a) Tujuan

- Terbentuknya Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah dan Kepemimpinan Daerah
- Mewujudkan data kependudukan dan Pencatatan Sipil
- Meningkatkan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Desa

b) Sasaran

- Meningkatnya kapasitas penyelenggaraan pemerintahan Desa/Kelurahan yang efektif dan efisien melalui SDM Aparatur Desa dan Kelurahan yang berkualitas, serta penguatan kelembagaan Desa dan Kelurahan yang berdayaguna dan berhasilguna.
- Meningkatnya kekayaan dan pendapatan Desa dengan mengembangkan Sumber Daya Desa melalui program-program sektor.
- Meningkatnya kemampuan SDM pelaksana dalam pengelolaan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.
- Meningkatnya kapasitas jaringan sistem informasi administrasi Kependudukan (SIK) berskala regional dan nasional.
- Menurunnya permasalahan administrasi serah terima P3D pada pemerintah Daerah provinsi Jawa Timur dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
- Mewujudkan pengisian jabatan dan pelaksanaan tugas anggota/pimpinan DPRD yang memenuhi syarat sesuai ketentuan yang berlaku.
- Meningkatnya penyusunan data administrasi wilayah, kode daerah dan toponimi serta terpenuhinya antar daerah baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota.
- Terbentuknya Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah dan Kepemimpinan Daerah
- Mewujudkan data kependudukan dan Pencatatan Sipil

- Meningkatkan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Desa

c) Pagu dan Realisasi Program

Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah dengan pagu sebesar Rp. 11.373.015.851,00 dengan realisasi sebesar Rp. 11.244.667.889,00 (98,87%) yang secara rinci realisasi per kegiatan yang terdiri dari realisasi anggaran dan capaian ukuran keberhasilan dapat dilihat pada LAMPIRAN (Matrik 11 Kolom).

d) Hasil Pelaksanaan Pembangunan

- Rapat Koordinasi Monitoring Penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebanyak 4 kali, Rapat Pengembangan Administrasi Desa sebanyak 1 kali dan Sosialisasi RPJM Desa sebanyak 1 Kali,
- Penyelenggaraan Peringatan Hari Jadi Provinsi Jawa Timur sebanyak 1 kali,
- Rakor Penyusunan LPPD sebanyak 1 kali,
- Rakor Fasilitasi Penyelesaian P3D sebanyak 1 kali dan Rapat Evaluasi Pelaksanaan Otonomi Daerah sebanyak 1 kali,
- Fasilitasi Pergantian Antar Waktu Pimpinan/Anggota DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota, Monitoring evaluasi penyelenggaraan Dekonsentrasi & Tugas Pembantuan,
- Penyelengagraan Hari Jadi Otonomi Daerah,
- Pelatihan aparatur provinsi sebanyak 44 pelatihan dan 12 kegiatan non diklat.
- Program Strategis Nasional Kependudukan diantaranya adalah pemutakhiran data base kependudukan, Penerbitan Nomor Induk Kependudukan Rapat Koordinasi Kependudukan dan Capil sebanyak 1 kali, Rakor E-KTP sebanyak 1 kali. Dalam rangka perlindungan anak dan memberikan jaminan kepastian hukum terhadap status hukum anak,

maka Pemerintah mempunyai program strategis Nasional kependudukan antara lain :

- a. Untuk Pencatatan sipil melalui Program strategis tentang kependudukan dan pencatatan sipil tersebut dikeluarkan Surat Edaran Menteri dalam Negeri No.474.1/2218/SJ tanggal 1 Agustus 2008 tentang Rencana Strategis 2011`Semua Anak Indonesia Tercatat kelahirannya, Masa dispensasi pelayanan pencatatan kelahiran yang telah dikeluarkan pada tahun 2007, 2009, 2010 dan 2011 dan Nota kesepahaman delapan Menteri terkait percepatan kepemilikan akte kelahiran tahun 2011.
- b. Terkait dengan pencatatan sipil sampai dengan bulan oktober 2011 angka pencapaian kepemilikan akte kelahiran untuk usia 0-18 tahun sebanyak 6.660.779 dari jumlah anak usia 0-18 tahun sebanyak 10.717.032 dan jumlah penduduk Jawa Timur 40.848.432 sehingga prosentase yang dicapai sebanyak 62,15 % dengan rincian sbb:

Tabel 4.93
Rekapitulasi Kepemilikan Akte Kelahiran Tahun 2011

NO	KAB/KOTA	JUMLAH PENDUDU K	WAJIB AKTE (0-18)	MEMILIKI AKTE	%	TDK MEMILIKI AKTE	%
1.	Kab. Pacitan	584.330	148.709	100.824	67,79	47.885	32,20
2.	Kab. Ponorogo	1.029.648	231.244	2.346	1,01	228.898	98,98
3.	Kab.Trenggalek	811.029	206.402	37.964	18,39	168.438	81,60
4.	Kab. T.Agung	1.143.546	291.052	197.332	67,80	93.720	32,20
5.	Kab. Blitar	1.262.427	321.281	217.828	67,80	103.453	32,20
6.	Kab. Kediri	1.477.248	485.432	143.868	29,64	341.564	70,36
7.	Kab. Malang	2.837.203	722.054	489.551	67,80	232.503	47,49
8.	Kab. Lumajang	1.082.298	275.439	186.747	67,80	88.692	32,20
9.	Kab. Jember	2.268.151	577.233	391.363	67,80	185.870	32,20
10.	Kab.Banyuwangi	1.614.273	578.203	242.881	42	335.322	58
11.	Kab. Bondowoso	754.857	192.107	130.248	67,80	61.859	32,20
12.	Kab. Situbondo	653.617	166.342	112.779	67,80	53.563	32,20
13.	Kab.Probolinggo	1.184.117	301.351	204.316	67,80	97.035	32,20
14.	Kab. Pasuruan	1.469.386	373.951	253.538	67,80	120.413	32,20
15.	Kab. Sidoarjo	1.991.776	506.897	343.675	67,80	163.222	32,20
16.	Kab. Mojokerto	1.088.632	277.061	187.840	67,80	89.211	32,20
17.	Kab.Jombang	1.315.977	334.909	227.068	67,80	107.841	32,20
18.	Kab.Nganjuk	1.195.998	422.500	284.251	67,27	138.249	32,72
19.	Kab.Madiun	772.859	196.688	133.354	67,80	63.334	32,20
20.	Kab.Magetan	700.492	178.271	120.867	67,80	57.404	32,20
21.	Kab.Ngawi	912.721	169.988	90.983	53,52	79.005	46,47
22.	Kab.Bojonegoro	1.415.853	369.505	349.163	94,50	20.342	5,50
23.	Kab. Tuban	1.239.144	315.356	213.810	67,80	101.546	32,20
24.	Kab.Lamongan	1.506.878	383.493	260.007	67,80	123.486	32,20

25.	Kab.Gresik	1.249.333	317.949	215.568	67,80	102.381	32,20
26.	Kab.Bangkalan	1.190.376	302.944	205.395	67,80	97.549	32,20
27.	Kab.Sampang	871.038	221.674	150.295	68	71.379	32,20
28.	Kab. Pamekasan	833.265	212.061	143.777	67,80	68.284	32,20
29.	Kab.Sumenep	1.100.507	280.073	189.889	67,80	90.184	32,20
30.	Kota Kediri	301.241	84.596	-	0	-	
31.	Kota Blitar	145.306	36.979	25.072	67,80	11.907	32,20
32.	Kota Malang	893.743	227.453	154.212	67,80	73.241	32,20
33.	Kota Probolinggo	217.868	55.446	37.592	67,80	17.854	32,20
34.	Kota Pasuruan	201.198	51.203	34.716	67,80	16.487	32,20
35.	Kota Mojokerto	133.900	34.076	23.104	67,80	10.972	32,20
36.	Kota Madiun	198.981	50.639	34.333	67,80	16.306	32,20
37.	Kota Surabaya	2.992.487	761.573	516.345	67,80	245.228	32,20
38.	Kota Batu	206.629	54.908	7.898	14,38	47.010	85,61
	J U M L A H	40.848.432	10.717.032	6.660.799	62,15	3.971.637	37,85

a. Dalam rangka tertib administrasi Pemerintah melaksanakan 3 prioritas pembangunan yang salah satunya adalah penerapan E-KTP agar semua penduduk dapat didata dan mempunyai identitas dengan dasar penyelenggaraan antara lain :

- Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk berbasis Nomor Induk Kependudukan secara Nasional ;
- Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk berbasis Nomor Induk Kependudukan secara Nasional ;
- Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk berbasis Nomor Induk Kependudukan secara Nasional

d. Terkait dengan pencapaian pelaksanaan E-KTP di Provinsi Jawa Timur data penduduk yang sudah melaksanakan e-KTP sampai dengan pertengahan bulan Desember 2011 mencapai 36,13% dari 12 Kabupaten/Kota yang sudah melaksanakan e-KTP tahun 2011 dengan rincian sbb :

Tabel 4.94
Rekapitulasi Pelaksanaan E-Ktp Di 12 Kab/Kota Provinsi Jawa Timur
Tahun 2011

NO.	KAB/KOTA	JML KEC	JML PENDUDUK	JML WAJIB KTP	REALISASI PELAKSANAAN E-KTP	PROSENTA SE	KET
1.	Kab. Sidoarjo	18	1.929.585	1.462.563	467.089	31,94 %	
2.	Kab. Ngawi	19	944.393	770.453	436.119	56,61 %	
3.	Kab.Sampang	14	1.008.799	773.438	132.039	17,07 %	
4.	Kab.Pamekasan	13	851.215	633.421	280.643	44,31 %	
5.	Kota Kediri	3	290.495	216.946	38.170	17,59 %	
6.	Kota Blitar	3	141.194	104.838	60.612	57,81 %	
7.	Kota Malang	5	871.145	660.824	96.361	14,58 %	
8.	Kota Pasuruan	3	195.718	139.785	90.959	65,07 %	
9.	Kota Mojokerto	2	133.675	98.513	82.960	84,21 %	
10.	Kota Madiun	3	189.966	146.000	73.499	50,34 %	
11.	Kota Surabaya	31	2.863.059	2.195.289	841.637	38,39 %	
12.	Kota Batu	3	200.039	149.363	55.209	36,96 %	
J U M L A H		117	9.669.283	7.348.433	2.655.297	36,13 %	

e) Permasalahan dan upaya pemecahannya

Permasalahan

- Pembangunan Jalan Tol Trans jawa yang menggunakan Tanah Kas Desa untuk pengurusan pada pelepasan Tanah Kas Desa dan Tanah Pengganti tidak ada kejelasan instansi yang menyelesaikan pensertifikatan.
- Banyaknya bantuan yang diluncurkan kepada Pemerintah Desa menyebabkan Aparatur Desa kesulitan dalam menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaannya.

- Percepatan pelayanan kepada masyarakat desa tidak ditunjang dengan aplikasi administrasi desa dalam pelayanan surat menyurat sehingga bagi Desa yang berada di perkotaan belum ditunjang percepatan pelayanan.
- Adanya tuntutan perangkat desa menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) seperti halnya Sekretaris Desa yang telah menjadi PNS.
- Sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 6 Tahun 2007 tentang Hari Jadi Provinsi Jawa Timur, yang ditindaklanjuti dengan ditetapkannya Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 6 Tahun 2007 Tentang Hari Jadi Provinsi Jawa Timur, maka masyarakat Jawa Timur mempunyai sarana dan wadah untuk merefleksikan semangat dan identitas serta jati diri melalui penetapan Hari Jadi Provinsi Jawa Timur tersebut.

Hari Jadi Provinsi Jawa Timur ditetapkan pada Tanggal 12 Oktober dan akan diperingati secara resmi setiap tahun, baik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota di seluruh Jawa Timur.

Dalam rangka persiapan Peringatan Hari Jadi Ke-66 Provinsi Jawa Timur Tahun 2011 telah diterbitkan Keputusan Gubernur Nomor 188/423/KPTS/013/2011 Tanggal 3 Agustus 2011 tentang Panitia Penyelenggara Peringatan Hari Jadi Ke-66 Provinsi Jawa Timur Tahun 2011. Beberapa persiapan telah dilaksanakan, sebagai berikut :

- ❖ Dalam rangka memberikan stimulasi kepada pemerintah daerah kabupaten / kota agar turut serta memperingati Hari Jadi Provinsi Jawa Timur dengan kegiatan yang bermanfaat bagi masyarakat, maka melalui APBD Provinsi Jawa Timur Tahun
- ❖ Anggaran 2011 telah dianggarkan bantuan keuangan sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) untuk masing-masing kabupaten/kota se-Jawa Timur sebagaimana tertuang dalam Surat

Gubernur Tanggal 31 Mei 2011 Nomor 100/7137/011/2011 dan Surat Gubernur Tanggal 17 Juni 2011 Nomor 100/8017/011/2011, yang dipergunakan untuk membiayai kegiatan Upacara Bendera dan kegiatan sosial, ekonomi serta seni budaya yang manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat ;

- ❖ Perumusan tema dan logo Peringatan Hari Jadi Ke-66 Provinsi Jawa Timur Tahun 2011, yang sesuai hasil Rapat Koordinasi terakhir, telah disetujui tema Peringatan Hari Jadi Ke-66 Provinsi Jawa Timur Tahun 2011 adalah : **SEMANGAT HARI JADI KE-66 PROVINSI JAWA TIMUR : "KITA BERANTAS KORUPSI UNTUK MENGURANGI KEMISKINAN"** ;
- ❖ Jadwal kegiatan sebagai berikut :

NO	HARI / TANGGAL / TEMPAT	Kegiatan
1.	Rabu, 28 September 2011 Pukul : 10.00 WIB s/d selesai Tempat : Aloon-aloon Kota Madiun	Pembukaan gelar pameran pelayanan publik provinsi jawa timur
2.	Jum'at, 30 September 2011 Pukul : 06.30 WIB s/d selesai Tempat : Halaman Kantor Gubernur Jawa Timur	Pembukaan pertandingan olah raga antar pejabat struktural di lingkungan pemerintah provinsi jawa timur
	Tanggal 3 - 10 Oktober 2011 Tempat : Lapangan Olah Raga DPU Bina Marga Provinsi Jawa Timur	Pertandingan olah raga antar pejabat struktural di lingkungan pemerintah provinsi jawa timur
3.	Sabtu, 1 Oktober 2011 Pukul : 19.00 WIB s/d selesai Tempat : Halaman Balai Kota Malang	Pembukaan east java shopping and cultural carnival Pelaksanaan : 1 - 30 oktober 2011

NO	HARI / TANGGAL / TEMPAT	Kegiatan
4.	Sabtu, 8 Oktober 2011 Pukul : 07.00 WIB s/d selesai Tempat : Kelurahan Balas Klumprik - Wiyung Surabaya	Bhakti sosial
5.	Senin, 10 Oktober 2011 Pukul : 19.00 WIB s/d selesai Tempat : Grand City Surabaya	Pembukaan jatim fair 2011 Pelaksanaan : 7 – 16 oktober 2011
6.	Selasa, 11 Oktober 2011 Pukul : 19.30 WIB s/d selesai Tempat : Gedung Negara Grahadi	Tasyakuran
7.	Rabu, 12 Oktober 2011 Pukul : 08.00 WIB s/d selesai Tempat : Halaman Gedung Grahadi	Upacara bendera
8.	Rabu, 12 Oktober 2011 Pukul : 10.00 WIB s/d selesai Tempat : Gedung DPRD Provinsi Jawa Timur	Sidang paripurna istimewa dprd provinsi jawa timur
9.	Selasa, 11 Oktober 2011 Pukul : 18.00 WIB s/d 19.00 WIB Tempat : Studio JTV	Talkshow gubernur jawa timur
10.	Sabtu, 15 Oktober 2011 Pukul : 19.00 WIB s/d selesai Tempat : Halaman DPRD Provinsi Jawa Timur	Pagelaran wayang kulit
11.	Minggu, 16 Oktober 2011 Pukul : 06.00 WIB s/d selesai Tempat : Start dan Finish di Depan Gedung Negara Grahadi	Jalan sehat
12.	Minggu, 16 Oktober 2011 Pukul : 14.00 WIB s/d selesai Tempat : Start : Depan Kantor	Pawai budaya jawa timur 2011

NO	HARI / TANGGAL / TEMPAT	Kegiatan
	Gubernur Jalan Pahlawan Finish : Halaman Gedung Negara Grahadi	
13.	Sabtu, 22 Oktober 2011 Pukul : 19.00 WIB s/d selesai Tempat : Taman Budaya Gentengkali	Pagelaran wayang kulit
14.	Minggu, 30 Oktober 2011 Pukul : 19.00 WIB s/d selesai Tempat : Tugu Pahlawan Surabaya	Penutupan East Java Shopping And Cultural Carnival

- Bahwa sampai dengan tanggal 21 Desember 2011, telah diterbitkan 27 (dua puluh tujuh) Keputusan Gubernur Jawa Timur tentang Peresmian Pemberhentian Sementara, Peresmian Pemberhentian, Peresmian Pengangkatan, Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Pimpinan/Anggota DPRD Kabupaten/Kota dan 1 (satu) Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Peresmian Pemberhentian Anggota DPRD Provinsi Jawa Timur serta 1 (satu) Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Peresmian Pengangkatan Anggota DPRD Provinsi Jawa Timur ;
- Bahwa masih terdapat beberapa permasalahan terkait dengan PAW Pimpinan/Anggota DPRD Provinsi dan Kab/Kota :
 1. Terdapat 1 (satu) Usulan Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota DPRD Provinsi Jawa Timur atas nama Sdr. Drs. YOYOK AGUS PRASETYO menggantikan Sdr. M FAUZI FARIED, Menteri Dalam Negeri belum bisa memproses Peresmiannya sebagai Anggota DPRD Provinsi Jawa Timur sampai Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap sehubungan dengan adanya gugatan Sdr. M. FAUZI FARIED dalam register perkara Nomor : 39/Pdt.G/2011/PN.Sby, tanggal 19 Januari 2011 ;

- Masih adanya kabupaten/kota yang belum memahami mekanisme/persyaratan usulan peresmian pemberhentian dan pengangkatan Anggota/Pimpinan DPRD Kabupaten/ kota, sehingga berkas usulan sering belum lengkap sehingga membutuhkan waktu yang lama ;
- Kepemilikan akta kelahiran anak usia 0-18 tahun sebanyak 62%, permasalahan terkait akte kelahiran masih banyak dijumpai di Orsos baik milik Pemerintah maupun Swasta dimana banyak anak panti yang belum memiliki akte kelahiran masih mengalami kesulitan dalam pengurusannya.
- Pelaksanaan Penerapan E-KTP pada 12 Kabupaten/Kota di Jawa Timur diperkirakan tidak bisa diselesaikan tepat waktu dari target yang ditentukan yaitu akhir Desember 2011, karena peralatan E-KTP dari Pemerintah Pusat belum dikirim secara keseluruhan, yang sudah terkirim sebagian rusak sebelum dipakai, sebagian peralatan tidak lengkap sehingga mengganggu pelaksanaan penerapan E-KTP.
- Pelaksanaan pendataan penduduk rentan administrasi kependudukan (rentan adminduk) masih banyak Kab/Kota yang belum melaksanakan pendataan penduduk rentan adminduk, sehingga tidak dapat dilakukan pemutakhiran data kependudukan yang terkait E-KTP dikarenakan Kab/Kota belum berani mendata penduduk rentan adminduk. Hal ini menjadikan penduduk rentan adminduk tidak mendapatkan haknya sebagai gakin yang seharusnya mendapat kemudahan terkait keluarga miskin seperti jamkesmas, jampersal dan fasilitas bagi penduduk meiskin lainnya.
- Dalam rangka efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan monitoring dan evaluasi yang terkait dengan penyerahan P3D dan urusan pemerintahan di wilayah Provinsi Jawa Timur, telah ditetapkan Surat

Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/361/KPTS/013/2011 tentang Tim Teknis Otonomi Daerah Provinsi Jawa timur Tahun 2011;

- Permasalahan yang dihadapi oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan pemerintahan di wilayah Jawa Timur. Permasalahan Penyerahan Personil, Peralatan, Pembiayaan dan Dokumen (P3D) didasarkan pada :
 - Berita Acara Nomor 118/14401/012/2000 Tanggal 21 Desember 2000 dan Berita Acara Nomor 118/2641/012/2001 Tanggal 21 Maret 2001, Pemerintah Provinsi Jawa Timur melakukan serah terima P3D kepada pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota ;
 - Berita Acara Nomor 118/14401/012/2000 Tanggal 21 Desember 2000, meliputi P3D yang berasal dari Instansi Vertikal yang terdiri dari Departemen Penerangan, Departemen Pariwisata, Seni dan Budaya, Departemen Pekerjaan Umum, Departemen Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah serta Departemen Transmigrasi dan PPH;
 - Berita Acara Nomor 118/2641/012/2001 Tanggal 21 Maret 2001, meliputi P3D yang berasal dari Instansi Vertikal yang terdiri dari Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral, Departemen Perindustrian dan Perdagangan, Departemen Pertanian, Departemen Kehutanan dan Perkebunan, Departemen Kelautan dan Perikanan, Departemen Perhubungan, Departemen Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial, Departemen Pendidikan Nasional, Kantor Arsip Nasional dan Perpustakaan Nasional.
 - Berdasarkan inventarisasi permasalahan P3D dan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah sampai dengan Bulan Agustus 2011 di Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Jawa Timur, terdapat permasalahan secara garis besar sebagai berikut :

- Status kepemilikan aset hasil penyerahan P3D baik berupa tanah, bangunan maupun kendaraan yang tidak didukung oleh sertifikat maupun berita acara sehingga terjadi ketidakjelasan kepemilikan yang
- mengakibatkan beberapa aset tidak terurus dan dibiarkan dalam keadaan rusak ; (daftar selengkapnya terlampir)
- Sengketa hukum kepemilikan aset hasil penyerahan P3D yang diakibatkan kesalahan berita acara atau tidak ada tindak lanjut terhadap implementasi berita acara yang telah ada sehingga diperlukan upaya-upaya administratif dan hukum yang melibatkan berbagai instansi, diantaranya : permasalahan SDN Burengan Kediri, SMPN 6 Tuban dan lain-lain ; (daftar selengkapnya terlampir)
- Berdasarkan inventarisasi permasalahan penyelenggaraan urusan pemerintahan per tanggal 20 Juni 2011 di Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Jawa Timur, terdapat permasalahan sebagai berikut diantaranya :
 - Tidak adanya tim koordinasi kerjasama daerah, tidak adanya SKPD khusus menangani kerjasama daerah, petunjuk teknis kerjasama dan pembiayaan kerjasama daerah dalam wilayah Jawa Timur.
 - Belum adanya lembaga daerah yang menjalankan urusan yang belum tertangani Badan Narkotika Provinsi dan Badan Narkotika Kabupaten/Kota;
 - Multi penafsiran mengenai sebutan pembagian urusan pemerintahan skala Nasional, skala Provinsi dan skala Kabupaten/Kota dalam lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 di daerah;
 - Tidak dapatnya pembalikan nama sertifikat Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
 - Asset rumah dinas di malang dan wisma guru di Surabaya yang di claim kepemilikannya oleh PGRI Kota Malang dan PGRI Jawa Timur;

- Asset Provinsi berupa tanah/bangunan eks Departemen yang terdapat di daerah, pada kenyataannya disalahgunakan peruntukannya, tidak terawat dengan baik serta belum diserahkan sepenuhnya kepada Provinsi Jawa Timur.

Upaya pemecahannya

- Untuk pengukuran s/d pensertifikatan baik Tanah Kas Desa yang dilepas maupun Tanah Pengganti dimintakan kejelasan kepada Dirjen Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum sesuai surat Gubernur Jawa Timur tanggal 22 Juni 2011 Nomor : 143/8258/011/2011, namun sampai saat ini belum memperoleh jawaban.
- Untuk pemahaman Aparatur Desa dalam pengelolaan keuangan desa telah dilakukan Pembinaan Teknis (Bintek) baik di Kabupaten, di Provinsi namun mengingat jumlah Desa sebanyak 7.721, maka Bintek di Provinsi tidak bisa menjangkau keseluruhan sehingga sharing dengan Kabupaten yang tidak dibekali Kabupaten diajukan ke Provinsi untuk dilakukan Pembinaan Teknis (Bintek).
- Pelayanan surat menyurat perlu dilengkapi dengan program aplikasi pada desa-desa di Jawa Timur seperti halnya Kabupaten Ponorogo melalui Program SIMADES.
- Tuntutan Perangkat Desa telah diteruskan kepada Dirjen PMD Kementerian Dalam Negeri sebagai bahan pertimbangan.
- Perlunya sosialisasi dan publikasi yang lebih intensif terutama dengan mengutamakan partisipasi masyarakat secara luas dengan memberikan ruang partisipasi yang lebih luas untuk menyelenggarakan kegiatan-kegiatan yang berbasis masyarakat dengan memperkuat potensi-potensi serta kearifan lokal yang telah tumbuh dan berkembang di dalam masyarakat ;

- Penyelenggaraan kegiatan-kegiatan yang secara langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat baik kegiatan ekonomi, sosial maupun budaya.
 - Melalui surat Gubernur Jawa Timur tanggal 16 Desember 2011 Nomor : 171/20519/011/2011 Perihal Permohonan Surat Pernyataan dari Pengadilan negeri Surabaya, intinya meminta kepada Pengadilan Negeri Surabaya untuk memberikan Surat Pernyataan tidak adanya upaya hukum pada tingkat kasasi dari Sdr. M. FARIED FARIED FR, sehingga Putusan terhadap yang bersangkutan (Putusan Nomor 39/Pdt.G/2011/PN.Sby tanggal 8 September 2011) dapat dinyatakan telah memiliki kekuatan hukum tetap sebagai dasar penetapan Keputusan Menteri Dalam Negeri RI tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan PAW Anggota DPRD Provinsi Jawa Timur ;
- Rapat Tim PAW dengan Kabupaten/Kota yang melakukan usulan peresmian pemberhentian dan pengangkatan PAW untuk melengkapi berkas persyaratan tersebut.
 - Meningkatkan sosialisasi dispensasi Perpanjangan Masa Berlaku Dispensasi Pelayanan Pencatatan Kelahiran melalui anggota Tim Provinsi Renstra Semua Anak Tercatat Kelahirannya sampai akhir 2011 agar kepemilikan akta kelahiran anak usia 0-18 tahun pada akhir tahun 2011 mencapai mendekati 100 %.
 - Menghimbau kepada Pemerintah Pusat agar peralatan E-KTP segera dikirim ke tempat pelayanan di setiap Kecamatan tepat waktu dan sesuai dengan jumlah yang ditetapkan, mengganti/memperbaiki peralatan E-KTP yang rusak/tidak lengkap.
 - Menghimbau kepada para Tim Provinsi Renstra 2011 Semua anak Jawa timur tercatat kelahirannya untuk mendukung program tersebut melalui tugas pokok dan fungsinya masing-masing, selain

mendukung penuh Nota Kesepahaman Delapan menteri tentang percepatan kepemilikan akte kelahiran melalui rapat Tim Renstra dan rapat koordinasi evaluasi pencatatan kelahiran.

- Menghimbau kepada Kab/Kota agar segera melakukan pendataan terhadap penduduk rentan administrasi kependudukan sehingga semua penduduk tercatat identitasnya dan hak sipilnya melalui rapat koordinasi pendataan penduduk rentan administrasi kependudukan.
- Penyelenggaraan Peringatan Hari Otonomi Daerah Ke-XV Tahun 2011 berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1996 Tentang Hari Otonomi Daerah, dimana Tanggal 25 April ditetapkan sebagai Hari Otonomi Daerah dan diperingati setiap tahun untuk merefleksikan kembali makna kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah yang telah diimplementasikan sejak Tahun 1999. Tema Peringatan Hari Otonomi Daerah Ke-XV Tahun 2011 adalah: “Dengan Semangat Otonomi Daerah, Kita Tingkatkan Kinerja Pemerintah Daerah dalam Pelayanan Publik dan Inovasi Daerah”.
- Peringatan di Tingkat Nasional dipusatkan di Balai Kota Bogor yang dihadiri oleh Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia, dimana pada acara tersebut diumumkan dan diberikan penghargaan kepada Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota berprestasi sebagai hasil Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EKPPD) dan Evaluasi Daerah Otonom Hasil Pemekaran (EDOHP).
- Peringatan Hari Otonomi Daerah Ke-XV Tahun 2011 di Provinsi Jawa Timur, diselenggarakan Upacara pada:
 - Hari / Tanggal : Senin / 25 April 2011
 - Waktu : Pukul 07.00 WIB.
 - Tempat : Halaman Kantor Gubernur Jawa Timur Jl. Pahlawan 110 Surabaya

- Bertindak selaku Inspektur Upacara adalah Wakil Gubernur Jawa Timur dengan membacakan Sambutan Menteri Dalam Negeri pada Peringatan Hari Otonomi Daerah.
- Dalam penyelenggaraan Upacara Peringatan Hari Otonomi Daerah Ke-XV Tahun 2011 di tingkat Provinsi Jawa Timur, diisi pula dengan acara penyerahan piala dan piagam penghargaan kepada Camat Berprestasi Tahun 2010. Adapun Camat Berprestasi Tahun 2010 sebagai berikut :
 - Juara I : Sdri. Dra. NURUL AZIZAH, MM., Camat Kalitidu, Kabupaten Bojonegoro. (di berikan uang pembinaan sebesar Rp. 17.500.000,00 + Piala + Piagam Penghargaan);
 - Juara II : Sdr. JOKO LELONO, AP., Camat Dolopo, Kabupaten Madiun. (di berikan uang pembinaan sebesar Rp. 15.000.000,00 + Piala + Piagam Penghargaan);
 - Juara III : Sdr. Drs. M.S. HERUWIDI, MM., Camat Paciran, Kabupaten Lamongan. (di berikan uang pembinaan sebesar Rp. 12.500.000,00 + Piala + Piagam Penghargaan);
 - Juara Harapan I : Sdr. H. SYAIFULLAH FARID WADJI, SH.,MH., Camat Galis, Kabupaten Pamekasan. (Piala +Piagam Penghargaan);
 - Juara Harapan II : Sdr. NURMAN RAMDANSYAH, SH., M.Hum, Camat Kepanjen Kabupaten Malang. (Piala +Piagam Penghargaan).

2) Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah

a) Tujuan

Meningkatkan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Umum

b) Sasaran

Meningkatnya penyusunan data administrasi wilayah, kode daerah toponimi, terpenuhinya kerjasama antara daerah baik provinsi maupun Kabupaten/Kota

c) Pagu dan Realisasi Program

Program ini terdiri dari kegiatan dengan pagu sebesar Rp 930.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 929.892.400,00 (99.99%) yang secara rinci realisasi per kegiatan yang terdiri dari realisasi anggaran dan capaian ukuran keberhasilan dapat dilihat pada LAMPIRAN (Matrik 11 Kolom)

d) Hasil Pelaksanaan Pembangunan

- Pelaksanaan program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah pada Biro Administrasi Pemerintahan Umum berupa Rapat
- Penyelesaian Batas Antar Daerah sebanyak 2 kali, Keikutsertaan dalam rapat Kerja Forum Mitra Praja Utama sebanyak 3 kali, Keikutsertaan dalam rapat Kerja Forum Asosiasi Pemerintahan sebanyak 10 kali

e) Permasalahan dan upaya pemecahannya

Permasalahan

- Permasalahan batas antar Kabupaten Kediri dengan Kabupaten Blitar yang terletak di kawasan Gunung Kelud
- Penyelesaian Batas Daerah antar Kabupaten Banyuwangi dengan Kabupaten Bondowoso terletak di Kawah Ijen

Upaya pemecahannya

- Pemerintah Provinsi Jawa Timur sudah memfasilitasi penyelesaian perselisihan batas antar Kabupaten Kediri dengan Kabupaten Blitar yang terletak di Kawasan Gunung Kelud sampai dengan sekarang masih dalam proses penyelesaian.
- Pemerintah Provinsi Jawa Timur sudah memfasilitasi permasalahan Batas Daerah antar Kabupaten Banyuwangi dengan Kabupaten Bondowoso tentang Kawah Ijen dan sampai sekarang baru masuk tahap pengkajian dokumen dari kedua belah pihak

3. BIRO ADM. KERJASAMA

1) Program peningkatan Kerjasama

a) Tujuan

- Menciptakan kesamaan visi diantara aparaturnya tentang pentingnya kerjasama sebagai salah satu upaya untuk memajukan Jawa Timur dan mensejajarkan dengan daerah atau bangsa lain dan tetap menjaga keutuhan serta keharmonisan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- Terciptanya kerjasama di berbagai bidang antara Pemerintah Provinsi Jawa Timur dengan Pemerintah Provinsi/Pemerintah Kabupaten/Kota dan Lembaga di Dalam Negeri serta dengan Pemerintah Provinsi/Negara Bagian dan Lembaga di Luar Negeri.
- Mempercepat peningkatan SDM dan pemulihan ekonomi masyarakat

b) Sasaran

- Menyusun dan mensosialisasikan kepada dinas/instansi di lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota tentang tatacara kerjasama dengan instansi dan lembaga dalam dan luar negeri
- Mendorong dan memfasilitasi kerjasama antar Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota dan Lembaga di Dalam Negeri serta Pemerintah Provinsi/Negara Bagian dan Lembaga di Luar Negeri dalam berbagai bidang untuk mendukung dan mendorong pembangunan daerah.
- Meningkatkan dan mengembangkan kerjasama dalam dan luar negeri yang efektif dan efisien.

c) Pagu dan realisasi Program

Program peningkatan Kerjasama dengan total anggaran sebesar Rp.15.945.000.000,00 dengan realisasi Rp.14.828.650.185,00 (93.00%) secara rinci realisasi perkegiatan yang terdiri dari realisasi anggaran dan capaian ukuran keberhasilan dapat dilihat pada Lampiran (Matrik 11 Kolom).

d) Hasil Pelaksanaan Pembangunan

Fasilitasi Kerjasama Antar Daerah dengan Luar Negeri

- Pengiriman 1 orang santri ke Australia Barat dengan harapan dapat menjadi agen perubahan di lingkungannya;
- Pelatihan audiologi dan terapi wicara dari Jawa Timur ke Australia Barat sebanyak 10 orang;
- Melakukan kerjasama dengan negara Belanda melalui Neso bidang hortikultura.
- Penerimaan tamu asing dari : DAFWA- Australia Barat, Dubes Australia, Wartawan perang dari Perancis, Dubes New Zealand, Mahasiswa dari Perancis, tenaga ahli persampahan dari Perancis, Gubernur Gyeongnam-do Korea Selatan, Gubernur Osaka, Delegasi dagang Malaysia, delegasi pengusaha China, delegasi prefecture-Mie Jepang.
- Expose Field Study persusuan di Perancis
- Promosi TTI di Korea dan China
- MOU PemProv Jatim dengan Nestle di Jenewa ttg pengembangan persusuan berkelanjutan
- Peningkatan kerja sama dengan Tianjin China bidang kesehatan, olahraga, perdagangan, pertanian, peternakan.

Fasilitasi Kerjasama antar Kabupaten/Kota, Provinsi dengan Kabupaten/Kota, antar Provinsi dengan Provinsi Lain

- Terlaksananya fasilitasi kerjasama antar kabupaten/kota sewilayah Malang Raya
- Terlaksananya fasilitasi kerjasama antar kab/Kota di wilayah selingkar Wilis
- Terlaksananya fasilitasi kerjasama antar kab/kota se Jatim di bidang kesehatan
- Terlaksananya fasilitasi kerjasama antar daerah Agro Industri Madura
- Terlaksananya fasilitasi kerja sama tentang sharing dana pendidikan Dasar Madrasah Diniyah dengan kab/kota se Jatim

- Terlaksananya kerja sama dengan Prov.Jateng bidang pengamanan perda oleh SatPol.PP dan pelayanan kesehatan Gakin Non Kuota
- Terlaksananya penjjagaan kerjasama dengan Prov.Sulawesi Utara
- Terlaksananya penjjakaan kerjasama dengan Prov.KalTim, Prov.KalSel dan Prov. NTT bidang perdagangan.
- Terlaksananya penjjakaan kerjasama dengan Prov.KalBar dan Prov. Kepulauan Riau tentang human trafficking
- Fasilitasi kerjasama antar Kabupaten di kawasan Pawonsari bidang kesehatan di UPT Puskesmas
- Persiapan kerja sama antar daerah kabupaten di kawasan Karismapawirogo bidang ketertiban, keamanan dan pelanggaran perda
- Persiapan kerja sama antar daerah kabupaten dikawasan Ratubangnegoro.

Fasilitasi Kerjasama Daerah dengan Lembaga Nasional dan Internasional,

- Memfasilitasi 25 lembaga terhadap SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur maupun SKPD Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan Kerjasama Daerah dengan lembaga Internasional, pihak Ketiga (Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian dan Badan Hukum);
- Menyusun naskah/dokumen Kerjasama Daerah dengan Lembaga Internasional, pihak ketiga (Kementerian/lembaga pemerintah Non Kementerian dan Badan Hukum);
- Bimbingan di bidang manajemen perhotelan dan manajemen pemasaran dengan mendatangkan tenaga ahli dari negara Belanda;
- Pelatihan manajemen perikanan di negara Belanda.

Monitoring Evaluasi dan Pengendalian di Bidang Administrasi Kerjasama, dengan hasil yang dicapai :

- Penyusunan buku laporan monitoring Kerjasama Daerah tahun 2011;
- Updating dan pemeliharaan Website Biro Administrasi Kerjasama.

Fasilitasi Koordinasi di Bidang Administrasi Kerjasama,

- Terselenggaranya rapat fasilitasi koordinasi peningkatan kerjasama antar daerah untuk meningkatkan daya saing daerah.
- Bimbingan teknis strategi mengatasi hambatan dalam kerja sama antar daerah.
- Terlaksananya rapat koordinasi kerjasama antar daerah selingkar Wilis.

e) Permasalahan dan upaya pemecahannya

Permasalahan

- Masih kurangnya kemampuan aparaturnya dalam antisipasi dan menentukan kebutuhan kerjasama yang prioritas
- Adanya pengaruh yang sangat sensitif akibat perubahan situasi politik, gangguan keamanan dan lingkungan hidup terhadap kegiatan kerja sama
- Masih adanya perbedaan pemahaman dalam mengimplementasikan kebijakan Otonomi Daerah

Upaya Pemecahannya

- Menyusun rencana kerja tahunan
- Melakukan koordinasi dan menciptakan jalur komunikasi yang efektif dengan mitra kerja sama

4. BIRO HUKUM

1) Program Pembentukan Produk Hukum.

a) Tujuan.

Tujuan program ini dimaksudkan untuk menciptakan berbagai produk hukum yang akan menjadi landasan hukum bagi perangkat dan masyarakat dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat sejahtera. Untuk mencapai tujuan tersebut dilaksanakan melalui tahapan kegiatan yang saling mendukung dan saling terkait satu dengan yang lain, sehingga menghasilkan produk hukum yang berkualitas serta memenuhi kebutuhan masyarakat.

b) Sasaran.

Adapun sasaran dari program ini adalah terjaminnya konsistensi seluruh produk hukum daerah, tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi dan kepentingan umum serta diketahui masyarakat umum.

c) Pagu dan Realisasi Program

Program Pembentukan Produk Hukum dengan total anggaran sebesar Rp 5.385.500.000,00 dengan realisasi Rp 5.317.620.055,00 atau sebesar 98,74% secara rinci realisasi perkegiatan yang terdiri dari realisasi anggaran dan capaian ukuran keberhasilan dapat dilihat pada Lampiran (Matrik 11 Kolom).

d) Hasil Pelaksanaan :

Pengkajian Produk Hukum Daerah sesuai peraturan perundang-undangan dimaksudkan untuk mengevaluasi raperda, mengklarifikasi Perda dan Peraturan Kepala Daerah Kabupaten/Kota se Jawa Timur, agar produk hukum yang dihasilkan tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi dan kepentingan umum sebagaimana telah diatur dalam pasal 136 ayat (4) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Pelaksanaan evaluasi dan klarifikasi produk-produk hukum daerah sampai dengan tgl. 31 Desember 2011 mencapai 734 Produk Hukum

Kabupaten/Kota (146,80 %) dari target tahun anggaran 2011 sebesar 500 produk hukum Kabupaten/Kota (sesuai Renstra Biro Hukum 2009 s/d 2014).

Pada Tahun 2011 telah ditetapkan 15 peraturan daerah dari target 40 peraturan daerah yang terdaftar dalam program legislasi daerah tahun 2011 atau sebesar 37,5 %. terdiri dari :

- Peraturan Daerah yang telah ditetapkan dan diundangkan sebanyak 13, terdiri dari:
- Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penagihan Pajak Daerah Dengan Surat Paksa.
- Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur.
- Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2011 tentang Tata Kelola Bahan Pupuk Organik di Provinsi Jawa Timur.
- Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2011 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan.
- Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air.
- Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
- Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2010.
- Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pelayanan Publik.
- Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2011 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2011.

- Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 10 Tahun 2011 tentang Dana Cadangan.
- Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2011 tentang Perbaikan Gizi.
- Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Air Tanah.
- Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 13 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2012.
- Peraturan Daerah yang telah disetujui oleh DPRD Provinsi Jawa Timur dan masih menunggu hasil evaluasi dari Menteri Dalam Negeri sebanyak 2, terdiri dari:
- Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur tentang Retribusi Daerah Provinsi Jawa Timur.
- Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Jawa Timur Tahun 2011 – 2031.
- Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Provinsi Jawa Timur telah mendorong dan mewujudkan web jdih Kabupaten/Kota antara lain :

➤ Tahun 2010

- Kota Surabaya : jdih.surabaya.go.id
- Kabupaten Ponorogo : jdih.jatimprov.go.id/kabponorogo
- Kabupaten Nganjuk : jdih.jatimprov.go.id/kabnganjuk
- Kabupaten Jember : jdih.jatimprov.go.id/kabjember
- Kabupaten Bojonegoro : jdih.jatimprov.go.id/kabbojonegoro
- Kota Batu : jdih.jatimprov.go.id/kotabatu
- Kabupaten Madiun : jdih.jatimprov.go.id/kabmadiun
- Kabupaten Mojokerto : jdih.jatimprov.go.id/kabmojokerto
- Kabupaten Situbondo : jdih.jatimprov.go.id/kabsitubondo
- Kabupaten Sumenep : jdih.jatimprov.go.id/kabsumenep

- Kabupaten Tuban : jdih.jatimprov.go.id/kabtuban
- Kabupaten Tulungagung : jdih.jatimprov.go.id/kabtulungagung
- Kota Mojokerto : jdih.jatimprov.go.id/kotamojokerto
(gambar
- Kota Probolinggo : jdih.jatimprov.go.id/kotaprobolinggo
- Kota Kediri : jdih.jatimprpov.go.id/kotakediri
- Kabupaten Pacitan : jdih.jatimprov.go.id/kabpacitan
- Kabupaten Pamekasan : jdih.jatimprov.go.id/kabpamekasan
- Kabupaten Sampang : jdih.jatimprov.go.id/kabsampang

➤ Tahun 2011

- Kabupaten Sidoarjo : jdih.sidoarjab.go.id
- Kabupaten Malang : bag-hukum.malangkab.go.id
- Kabupaten Gresik : www.jdih-gresik.net
- Kabupaten Trenggalek : jdih.jatimprov.go.id/kabtreggalek
- Kabupaten Magetan : jdih.jatimprov.go.id/kabmagetan
- Kota Malang : jdih.jatimprov.go.id/kotamalang
- Kabupaten Bangkalan : jdih.jatimprov.go.id/kabbangkalan
- Kabupaten Bondowoso : jdih.jatimprov.go.id/kabbondowoso
- Kabupaten Probolinggo : jdih.jatimprov.go.id/kabprobolinggo
- Kabupaten Ngawi : jdih.jatimprov.go.id/kabngawi
- Kabupaten Lamongan : jdih.jatimprov.go.id/kablamongan
- Kabupaten Pasuruan : jdih.jatimprov.go.id/kabpasuruan
- Kota Blitar : jdih.jatimprov.go.id/kotablitar

e) Permasalahan dan Upaya Pemecahannya

Permasalahan

- Sesuai pasal 189 UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah bahwa hasil Evaluasi Raperda harus dikoordinasikan ke Kementerian Keuangan Cq. Dirjen Perimbangan Keuangan di Jakarta, dan hasil evaluasi Gubernur harus disampaikan kepada Bupati/Walikota

paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak Raperda diterima Gubernur. Waktu yang terbatas tersebut menjadi suatu hambatan yang harus dihadapi.

- Lamanya jawaban pertimbangan dari instansi terkait menjadi hambatan utama dalam penyelesaian klarifikasi Perda
- Adanya peraturan perundang-undangan yang tumpang tindih dengan peraturan yang lain sehingga sulit diaplikasikan dalam penyusunan produk hukum daerah.
- Kurangnya koordinasi antara para SKPD sebagai Instansi pengusul/pemrakarsa Peraturan Daerah dengan Biro Hukum Setda Provinsi Jatim serta kurang siapnya SKPD dalam mempersiapkan kajian akademik/naskah akademik dari Raperda yang diusulkan.
- Belum semua kabupaten/kota menyatakan kesediaannya untuk bergabung walaupun diberikan secara gratis, karena berbagai alasan antara lain belum dimilikinya prasarana minimal berupa satu unit computer/laptop dan SDM yang mampu mengelola JDIH.

Upaya Pemecahannya

- Perlu adanya perubahan regulasi yang mengatur batasan waktu lebih dari 15 (lima belas) hari kerja dalam penyampaian hasil evaluasi Gubernur kepada Bupati/Walikota.
- Perlu pemahaman dari instansi terkait agar dalam memberikan pertimbangan/saran dapat secepatnya dilaksanakan.
- Pemerintah Pusat dalam menyusun produk hukum perlu disinkronkan dengan produk hukum yang telah ada agar tidak terjadi tumpang tindih pengaturan.
- Raperda-Raperda yang belum dibahas dan belum selesai dalam Prolegda 2011, menjadi skala prioritas pembahasan pada Prolegda 2012.

- Memberikan motivasi dan dukungan pada kabupaten/kota untuk segera bergabung.

2) Program Profesionalisme Bagi Aparat Hukum

a) Tujuan

Tujuan program ini dimaksudkan untuk meningkatkan kemampuan Sumber Daya Manusia dalam mempersiapkan perangkat hukum yang profesional dibidangnya sehingga menghasilkan produk hukum yang berkualitas serta memenuhi kebutuhan dalam menata kehidupan masyarakat.

b) Sasaran

Adapun sasaran dari program ini adalah meningkatnya pengetahuan SDM dalam upaya menciptakan sistem hukum yang adil, konsekuen dan tidak diskriminatif serta memulihkan kepercayaan hukum masyarakat secara keseluruhan.

c) Pagu dan Realisasi Program

Program Profesionalisme Bagi Aparat Hukum dengan total anggaran sebesar Rp 1.164.500.000,00 dengan realisasi Rp 1.158.948.260,00 atau sebesar 99,52% secara rinci realisasi perkegiatan yang terdiri dari realisasi anggaran dan capaian ukuran keberhasilan dapat dilihat pada Lampiran (Matrik 11 Kolom).

d) Hasil Pelaksanaan :

- terselesaikannya 24 kegiatan penanganan perkara, dalam lingkup Perdata dan Tata Usaha Negara.
- Terlaksananya kegiatan pemberian bantuan hukum sebanyak 200 masalah.
- Terlaksananya Rakor Panitia RANHAM Tahun 2011.

e) Permasalahan dan Upaya Pemecahannya

Permasalahan

Sulitnya koordinasi antar SKPD/Instansi dalam penanganan suatu perkara, pemberian bantuan perlindungan hukum dan pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM).

Upaya Pemecahannya

- Membentuk Tim Penanganan Sengketa dan Sekretariat Panitia Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) untuk mempermudah koordinasi.
- Melakukan kerjasama dengan Advokat/Konsultan Hukum dalam menangani sengketa hukum.
- Mengadakan Rapat Koordinasi untuk menyamakan persepsi terhadap permasalahan yang ada di Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur.

5. BIRO ADM. PEREKONOMIAN

1) Program Koordinasi, Sinkronisasi, Fasilitasi dan Evaluasi Bidang Perekonomian

a) Tujuan

menjadi media informasi pertumbuhan ekonomi Jawa Timur yang menjangkau seluruh SKPD di Jawa Timur (majalah SAREKDA)

b) Sasaran

Badan/Dinas/Instansi dan BUMD di Jawa Timur

c) Pagu dan Realisasi Program

Program Koordinasi, Sinkronisasi, Fasilitasi dan Evaluasi Bidang Perekonomian memiliki pagu sebesar Rp 367.060.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 367.050.000,00 (100.00%) yang secara rinci realisasi per kegiatan yang terdiri dari realisasi anggaran dan capaian ukuran keberhasilan dapat dilihat pada LAMPIRAN (Matrik 11 Kolom).

d) Permasalahan dan upaya pemecahannya

Permasalahan

Transaksi keuangan non tunai atau Real Time Gross Settlement (RTGS) Jawa Timur pada triwulan IV hanya mencapai Rp 148,29 triliun. Hal itu dikarenakan, kegiatan perekonomian Jatim masih terpusat di wilayah-wilayah tertentu. Padahal tingkat kebutuhan masyarakat provinsi menggunakan RTGS semakin bertambah.

“Penyebab peningkatan RTGS pada periode kemarin juga dipengaruhi oleh pertumbuhan perekonomian kabupaten/kota di Jatim. Akan Tetapi pertumbuhan itu hanya terlihat di beberapa titik Jatim (Ketimpangan pemerataan pembangunan ekonomi wilayah).

Upaya Pemecahannya

Dalam menyusun program dan kegiatan agar selalu mempertimbangkan kuantitas dan kualitas atau kapasitas dan kapabilitas yang dapat dirasakan oleh semua pihak;

2) Program Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pemerintahan dan Pembangunan

a) Tujuan

Keselarsan regulasi di bidang perekonomian

b) Sasaran

masyarakat Jawa Timur

c) Pagu dan Realisasi Program

Program Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pemerintahan dan Pembangunan memiliki pagu sebesar Rp 42.657.940.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 41.757.386.325,00 (97.89%) yang secara rinci realisasi per kegiatan yang terdiri dari realisasi anggaran dan capaian ukuran keberhasilan dapat dilihat pada LAMPIRAN (Matrik 11 Kolom).

d) Permasalahan dan upaya pemecahannya

Permasalahan

Kebijakan Pusat untuk menggunakan pelabuhan Tanjung Perak sebagai salah satu Sarana Pemasukkan (import) produk Hortikultura

Upaya Pemecahannya

Membuat kebijakan Impor produk hortikultura ke Jawa Timur dengan diterbitkannya Peraturan Gubernur No. 22 Tahun 2012 tentang Pengendalian Produk Impor Holtikultura dan Pemberdayaan Usaha Holtikultura di Jawa Timur dengan maksud untuk melindungi produk hortikultura lokal Jawa Timur

6. BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN SETDA PROVINSI JAWA TIMUR

1) Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah

a) Tujuan

Untuk meningkatkan pelaksanaan monitoring dan evaluasi kebijakan pembangunan di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam rangka pengembangan administrasi pembangunan baik dari dana APBN maupun APBD.

b) Sasaran

Seluruh SKPD Provinsi Jawa Timur yang mengelola dana APBN sebanyak 28 SKPD dan dana APBD sebanyak 69 SKPD

c) Pagu dan Realisasi Program

Alokasi dana untuk Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah sebesar Rp. 5.145.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 4.779.931.730,00 (92,90 %), yang secara rinci dapat dilihat pada Lampiran (Matrik 11 Kolom).

d) Hasil Pelaksanaan Pembangunan

Hasil pelaksanaan program/kegiatan diantaranya adalah sebagai berikut :

- Terlaksananya monitoring dan evaluasi pelaksanaan dana APBN maupun APBD
- Tersusunya laporan fisik dan keuangan baik dana APBN maupun APBD pada SKPD Provinsi Jawa Timur
- Terpeliharanya program aplikasi SMEP APBN dan APBD

e) Permasalahan

Belum seluruh SKPD dalam menyampaikan laporan kegiatan SMEP APBD maupun APBN ke Biro Administrasi Pembangunan secara tertib.

Upaya pemecahan permasalahan :

Pembinaan dan koordinasi dengan SKPD harus selalu dilakukan secara periodik agar SKPD memperoleh pemahaman akan tugas dan

tanggungjawabnya terhadap pelaporan kegiatan SMEP APBD maupun APBN.

2) Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

a) Tujuan

Untuk meningkatkan kemampuan aparat baik secara individu maupun kelembagaan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dalam bidang penyusunan program-program sekretariat daerah, bidang administrasi pengembangan prasarana wilayah, bidang administrasi pelaksanaan pembangunan dan bidang pengadaan barang/jasa.

b) Sasaran

Seluruh Pejabat Pengadaan, Pejabat Pembuat Komitmen, Panitia Pengadaan dan pengelola Keuangan di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur

c) Pagu dan Realisasi Program

Alokasi dana untuk Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah sebesar Rp. 3.045.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 3.006.245.890,00 (98,73 %), yang secara rinci dapat dilihat pada Lampiran (Matrik 11 Kolom).

d) Hasil Pelaksanaan Pembangunan

Hasil pelaksanaan program/kegiatan diantaranya adalah sebagai berikut :

- Pelaksanaan bimbingan teknis dan ujian sertifikasi keahlian nasional pengadaan barang/jasa pemerintah sebanyak 650 orang
- Terlaksananya pembinaan masyarakat jasa konstruksi sebanyak 700 orang
- Terpeliharanya software program aplikasi e-lelang prov. Jatim

e) Permasalahan

Belum seluruh SKPD memiliki personil yang bersertifikat dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah.

Upaya pemecahan permasalahan :

Agar selalu diadakan bimbingan teknis dan ujian sertifikasi keahlian nasional pengadaan barang/jasa di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur setiap tahun 4 kali guna memenuhi dan meningkatkan SDM pengelola keuangan maupun penitia pengadaan barang/jasa di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur

3) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dan Publik

a) Tujuan

Untuk meningkatkan peran dan fungsi Biro Administrasi Pembangunan sebagai aparat/staf Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur untuk secara koordinatif menyusun dan mengendalikan administrasi pelaksanaan pembangunan dilingkungan Sekretariat Daerah maupun pelaksanaan pembangunan Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

b) Sasaran

Seluruh pengelola APBD di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur sebanyak 69 SKPD, DPRD maupun pejabat instansi vertikal

c) Pagu dan Realisasi Program

Alokasi dana untuk Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dan Publik sebesar Rp. 5.335.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 4.449.066.075,00 (83,39 %), yang secara rinci dapat dilihat pada Lampiran (Matrik 11 Kolom).

d) Hasil Pelaksanaan Pembangunan

Hasil pelaksanaan program/kegiatan diantaranya adalah sebagai berikut :

- Pengadaan 38 unit perlengkapan rumah tangga
- Pengadaan 3 unit kendaraan roda 4

- 1 buku Standar Barang dan Harga Satuan barang Tahun 2012
- 1 buku Daftar Nama dan Alamat Pejabat
- Laporan perencanaan pengadaan barang dan hasil pengadaan barang/jasa

e) Permasalahan dan Upaya pemecahannya

Permasalahan

- Dalam pelaksanaan pengadaan barang pagu anggaran seringkali bertambah pada saat perubahan APBD sehingga prosesnya menjadi terhambat
- Pelaksanaan penyusunan buku daftar nama dan alamat pejabat masih harus menunggu sampai dengan adanya proses mutasi dan promosi pejabat

Upaya pemecahan permasalahan

- Agar dipersiapkan proses lelang setelah adanya penetapan APBD mendahului pengesahan Perubahan APBD

4) Program Koordinasi, Sinkronisasi, Fasilitasi dan Evaluasi Bidang Perekonomian

a) Tujuan

Untuk meningkatkan peran Biro Administrasi Pembangunan sebagai salah satu biro dilingkungan Sekretariat Daerah, yang mampu menyusun dan meningkatkan Kinerja Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah untuk mewujudkan Pemerintahan yang berprinsip *Good Governance*

b) Sasaran

Seluruh pengelola APBD di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur sebanyak 69 SKPD dan DPRD Provinsi Jawa Timur

c) Pagu dan Realisasi Program

Alokasi dana untuk Program Koordinasi, Sinkronisasi, Fasilitasi dan Evaluasi Bidang Perekonomian sebesar Rp. 2.825.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 2.746.427.349,00 (96,02 %), yang secara rinci dapat dilihat pada Lampiran (Matrik 11 Kolom).

d) Hasil Pelaksanaan Pembangunan

- 1 buku Pedoman Kerja dan Pelaksanaan Tugas Pemprov. Jatim Tahun 2012
- Laporan progress fisik dan keuangan proyek strategis di Jawa Timur

e) Permasalahan dan Upaya Pemecahannya

Permasalahan

- Sering terjadi keterlambatan dari SKPD terkait untuk memberikan data masukan dalam penyusunan buku pedoman
- Pelaksanaan proyek-proyek strategis sering terjadi hambatan dalam pembebasan tanah

Upaya pemecahan permasalahan

- Agar SKPD lebih awal dalam memberikan masukan dan usulan dalam penyusunan buku pedoman
- Sebelum melaksanakan pembangunan agar pembebasan lahan terlebih dahulu menjadi prioritas penanganan.

7. BIRO ADMINISTRASI SUMBER DAYA ALAM

1) Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

a) Tujuan

Meningkatnya kualitas pengelolaan sumber daya alam dengan aparatur pemerintah daerah kabupaten dan kota di Jawa Timur

b) Sasaran

Pengembangan kualitas aparat pelayanan public dengan melaksanakan Rapat Koordinasi dengan instansi di Kabupaten dan Kota di Jawa Timur;

c) Pagu dan Realisasi

Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dengan pagu Rp. 2.991.765.837 dengan realisasi sebesar Rp. 2.955.536.650,- (98,79 %) secara rinci realisasi per kegiatan yang terdiri dari realisasi anggaran dan capaian ukuran keberhasilan dapat dilihat pada LAMPIRAN (Matrik 11 Kolom).

d) Hasil Pelaksanaan Pembangunan

Meningkatnya kualitas pengelolaan sumber daya alam dengan aparatur pemerintah daerah kabupaten dan kota di Jawa Timur;

2) Program Koordinasi, Sinkronisasi, Fasilitasi dan Evaluasi Bidang

Perekonomian

a) Tujuan

- Meningkatkan fungsi koordinasi dengan instansi terkait kualitas pengelolaan sumber daya alam;
- Meningkatkan agrobisnis serta produksi sumber daya alam.

b) Sasaran

- Terwujudnya fungsi koordinasi dengan instansi terkait kualitas pengelolaan sumber daya alam;
- Tercapainya peningkatan produksi sumber daya alam.

c) Pagu dan Realisasi

Program Koordinasi, Sinkronisasi, Fasilitasi dan Evaluasi Bidang Perekonomian dengan pagu Rp. 3.653.808.500 dengan realisasi sebesar Rp. 3.638.607.090,- (99,58%) secara rinci realisasi per kegiatan yang terdiri dari realisasi anggaran dan capaian ukuran keberhasilan dapat dilihat pada LAMPIRAN (Matrik 11 Kolom).

d) Hasil Pelaksanaan Pembangunan

Meningkatnya efektifitas koordinasi dengan instansi terkait dalam pengelolaan sumber daya alam

e) Permasalahan dan Upaya Pemecahannya

Permasalahan

Masih lemahnya koordinasi dengan instansi terkait dalam peningkatan kualitas pengelolaan sumber daya alam di Jawa Timur,

Upaya Pemecahannya

mengefektifkan kegiatan rapat koordinasi dengan instansi terkait baik Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam sinkronisasi program/kegiatan dalam peningkatan kualitas pengelolaan sumber daya alam.

3) Program Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pemerintahan dan Pembangunan

a) Tujuan

- Meningkatkan fungsi koordinasi dan koordinasi dengan instansi terkait kualitas pengelolaan sumber daya alam;
- Mengembangkan data potensi sumber daya alam dalam upaya pemanfaatan sumber daya alam yang lestari.

b) Sasaran

- Terwujudnya fungsi koordinasi dan koordinasi dengan instansi terkait kualitas pengelolaan sumber daya alam;
- Terwujudnya data dan informasi tentang pemanfaatan fungsi dan kelestarian sumber daya alam.

c) Pagu dan Realisasi

Program Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pemerintahan dan Pembangunan dengan pagu Rp. 4.646.541.500 dan Realisasi sebesar Rp. 4.632.045.510 (99,69%) secara rinci realisasi per kegiatan yang terdiri dari realisasi anggaran dan capaian ukuran keberhasilan dapat dilihat pada LAMPIRAN (Matrik 11 Kolom).

d) Hasil Pelaksanaan Pembangunan

Meningkatnya fungsi koordinasi dengan instansi terkait tentang pengelolaan sumber daya alam

e) Permasalahan dan Upaya Pemecahannya

Permasalahan

Masih kurangnya koordinasi dengan instansi terkait dalam pelaksanaan kebijakan pengelolaan sumber daya alam di Jawa Timur dan terbatasnya sumber daya.

Upaya Pemecahannya

Mengefektifkan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan dengan instansi terkait terutama kebijakan dari Pemerintah Pusat.

8. BIRO ADMINISTRASI KESEJAHTERAAN RAKYAT

1) Program Koordinasi, Sinkronisasi, Fasilitasi dan Evaluasi Bidang Kesejahteraan Sosial dan Mental Spiritual

a) Tujuan

Program Koordinasi, Sinkronisasi, Fasilitasi dan Evaluasi Bidang Kesejahteraan Sosial dan Mental Spiritual adalah meningkatkan kemampuan aparat, baik secara individu maupun kelembagaan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya di bidang ketenagakerjaan dan transmigrasi, kesehatan masyarakat dan sosial

b) Sasaran

Program Koordinasi, Sinkronisasi, Fasilitasi dan Evaluasi Bidang Kesejahteraan Sosial dan Mental Spiritual adalah terwujudnya kemampuan aparat, baik secara individu maupun kelembagaan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dalam bidang penyusunan program ketenagakerjaan dan transmigrasi, kesehatan masyarakat dan sosial

c) Pagu dan Realisasi Program

Program Koordinasi, Sinkronisasi, Fasilitasi dan Evaluasi Bidang Kesejahteraan Sosial dan Mental Spiritual dengan total anggaran sebesar Rp. 20.200.000.000,00 dengan realisasi Rp. 19.976.463.088,00 (98,89%) yang secara rinci realisasi anggaran serta indikator, target dan realisasi kinerja per kegiatannya dapat dilihat pada Lampiran (Matrik 11 Kolom).

d) Hasil pelaksanaan program/kegiatan diantaranya adalah sebagai berikut:

- terlaksananya rakor program dan pembinaan terhadap keluarga miskin dalam menghadapi masalah kesejahteraan sosial
- meningkatnya status masyarakat dari sangat miskin menuju miskin

- meningkatnya Gizi masyarakat dan pelayanan kesehatan
- berkurangnya jumlah lima PMKS yang menjadi prioritas penanganan.

e) Permasalahan dan upaya pemecahannya

- Belum adanya Sinkronisasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan untuk masing-masing bagian pada SKPD dan untuk pemecahan permasalahannya perlu adanya komitmen dalam pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan, sehingga dapat terealisasi secara sinergi dan menyeluruh
- Kurangnya Komitmen SKPD teknis dalam penanganan PMKS, hal ini disebabkan karena tidak dapat melakukan deteksi dini terhadap populasi dan penyebaran PMKS, untuk pemecahannya harus dilakukan penanganan secara konkrit dan terukur dan diharapkan ada data by name, by address PMKS agar berpedoman pada surat Gubernur nomor 460/15612/031/2011 tanggal 20 Oktober 2011 tentang penanganan lokalisasi WTS di Jawa Timur dan surat tanggal 27 Desember 2011, nomor 460/21084/031/2011, tentang penanganan anak jalanan dan gelandangan pengemis di Jawa Timur

9. BIRO ADMINISTRASI KEMASYARAKATAN

1) Program Koordinasi, Sinkronisasi, Fasilitasi dan Evaluasi Bidang Kesejahteraan Sosial dan Mental Spiritual

a) Tujuan

Mengkoordinasikan, mensinkronkan, memfasilitasi dan mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan bidang mental spiritual

b) Sasaran

- Memberdayakan masyarakat agar mampu mengatasi masalahnya secara mandiri dengan memanfaatkan potensi yang dimiliki;
- Menciptakan masyarakat yang beriman, berpendidikan dan berbudaya;
- Meningkatkan pengembangan SDM Pemuda untuk keunggulan daya saing;
- Meningkatkan perlindungan terhadap hak-hak anak dan keberhasilan program KB;
- Mendukung efektivitas pelaksanaan program dinas/lembaga teknis pendidikan, kebudayaan dan pariwisata, agama, pemuda, olahraga, peranan perempuan dan perlindungan anak.

c) Pagu dan Realisasi Program

Program Koordinasi, Sinkronisasi, Fasilitasi dan Evaluasi Bidang Kesejahteraan Sosial dan Mental Spiritual sebesar Rp 19.224.000.000,00 dengan realisasi Rp 18.791.634.733,00 atau (97,75%), secara rinci realisasi per kegiatan yang terdiri dari realisasi anggaran dan capaian ukuran keberhasilan dapat dilihat pada LAMPIRAN (Matrik 11 Kolom).

d) Hasil Pelaksanaan Pembangunan

- Hasil Pelaksanaan program/kegiatan diantaranya adalah sebagai berikut :

- Meningkatnya kualitas pemahaman, penghayatan dan pengamalan ajaran agama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara
- Meningkatnya kualitas pelayanan kehidupan beragama bagi seluruh lapisan masyarakat sesuai agama yang dipeluknya
- Meningkatnya peran serta lembaga sosial keagamaan dan lembaga pendidikan keagamaan sebagai agen pembangunan masyarakat
- Terciptanya harmoni sosial dalam kehidupan intra dan antar umat beragama
- Berkurangnya perilaku masyarakat yang bertentangan dengan nilai-nilai moralitas agama
- Memberdayakan masyarakat agar mampu mengatasi masalahnya secara mandiri dengan memanfaatkan potensi yang dimiliki;
- Meningkatkan pengembangan SDM Pemuda untuk keunggulan daya saing;
- Meningkatkan perlindungan terhadap hak-hak anak dan keberhasilan program KB;
- Mendukung efektivitas pelaksanaan program dinas/lembaga teknis pendidikan, kebudayaan dan pariwisata, agama, pemuda, olahraga, peranan perempuan dan perlindungan anak.
- Peningkatan kualitas SDM guru Madin Se Jatim
- Meningkatnya wawasan pengetahuan dan kemampuan para Da'i Se Jatim para Da'i Se Jatim
- Meningkatnya kemampuan pengelolaan BAZ Jatim
- Terciptanya kesamaan langkah dan pemahaman dalam pengembangan Tilawatil Qur'an bagi LPTQ Prov dan Kab/Kota
- Terpilihnya Qori dan Qoriah Tingkat Nasional yang berkualitas sebanyak 46 orang dari 7 cabang
- Terjaganya kebersihan dan terpeliharanya peralatan selama 1 tahun

- Mempererat tali silaturahmi sesama umat Islam Nusantara
- Terselenggaranya peringatan hari-hari besar Islam
- Terciptanya komunikasi antara Pemprov dengan Kab/Kota se Jatim
- Terpeliharanya sarana dan fasilitas Islamic Center
- Dipahaminya oleh para pengelola pondok tentang bantuan operasional sekolah untuk lingkungan Ponpes Dipahaminya proses pencairan dan pengelolaan dana Bosda di lingkungan Ponpes
- Terjalinnya koordinasi penyelenggaraan wajar menengah12 th antara Pemprov dengan Kab/Kota se Jatim Penyelenggaraan Rakor rintisan pendidikan menengah
- Terjalinnya koordinasi penyelenggaraan pendidikan non formal antara Pemprov dan Pemkab/Kota se jatim
- Terjalinnya koordinasi pendidikan penyelenggaraan inklusi antara Pemprov dan PemKab/Kota di jatim
- Tumbuh dan berkembangnya koordinasi lembaga lembaga pendidikan baik formal maupun informal
- Meningkatnya pemahaman masyarakat dalam upaya melindungi dan memenuhi hak anak
- Tumbuh dan berkembangnya lembaga-lembaga pendidikan informal yang dikelola oleh masyarakat
- Terciptanya komunikasi antara Pemprov dengan Kab/Kota se Jatim
- Terselenggaranya kegiatan Parade Surya Senja setiap tanggal 17 sepanjang tahun 2011
- Terselenggaranya Rakor antara PemProv Jatim dengan Kab/Kota dalam upaya menangani permasalahan kepemudaan
- Terselenggaranya Rakor PUG-PUHA antara Pemprov dengan Kab/Kota
- Terselenggaranya Rakor PUG-PUHA antara Pemprov dengan SKPD Provinsi

- Terselenggaranya peringatan Hari Sumpah Pemuda Tk. Prov Jatim
- Terselenggaranya Peringatan Hari Ibu Tk. Prov.Jatim
- Terciptanya komunikasi antara Pemprov dengan Kab/Kota se Jatim dalam bidang Pemuda,Olahraga, Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak
- Diterimanya Proposal sesuai dengan ketentuan Pergub No.17 Tahun 2011
- Terselenggaranya Rapat Koordinasi antara Pemprov dengan Kab/Kota se Jatim
- Meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap perilaku santun
- Tercapainya persamaan persepsi terhadap pemahaman tentang seni etnik,fungsi dan peranan film sebagai media.
- Terjalannya koordinasi dan komunikasi antara Pemprov Jatim dengan Kab/Kota dalam upaya pengembangan kepariwisataan di Jatim
- Mengenang jasa para pahlawan korban pengkhianatan PKI terhadap NKRI
- Terselenggaranya kongres Bahasa Jawa V di Jatim
- Terjalannya koordinasi dan komunikasi antara Pemprov dengan Kab/Kota

e) Permasalahan dan Upaya Pemecahan

Permasalahan

- Jawa Timur merupakan gudangnya Pondok Pesantren, tetapi di Jawa Timur belum memiliki Pendidikan Tinggi / Ma'ahad Aly Al-Qur'an, apalagi Al-Hadits
- Data guru madin seringkali mengalami perubahan
- Sebagian Perguruan Tinggi Agama belum terakreditasi dan Perguruan Tinggi tersebut tidak bergerak untuk mengurus proses

akreditasi, sehingga berakibat terhadap tidak diakuinya lulusan perguruan tinggi yang bersangkutan.

- Belum optimalnya pengumpulan zakat melalui BAZ Prov. Jatim
- Belum adanya kesepakatan antara Pemerintah Provinsi dengan Kab/Kota tentang besaran sharing dana khususnya dalam rangka program Wajar Dikdas 12 tahun
- Belum dimilikinya Hak paten bidang seni dan budaya
- Kurangnya dukungan sarana prasarana dilingkungan obyek wisata
- Terjadinya penurunan peranan dan kualitas di kalangan generasi muda yang pada akhirnya menghambat proses kaderisasi pemimpin bangsa
- Masih banyaknya pengangguran pemuda dan kurangnya lapangan pekerjaan
- Rendahnya kompetensi dan kualitas pemuda terhadap daya saing global
- Terkikisnya jiwa nasionalisme dan cinta budaya bangsa serta jati diri bangsa
- Terbatasnya jumlah sarana dan prasarana olahraga di lingkungan permukiman maupun di lembaga pendidikan.
- Lemahnya pembibitan atlet, karena :
 - Semakin terbatasnya ruang/ prasarana untuk olahraga masyarakat terutama di perkotaan dan terbatasnya sarana olahraga di pedesaan;
 - Terbatasnya event kegiatan olahraga massal;
 - Pembinaan olahraga yang berkelanjutan masih terkendala biaya;
- Belum berkembangnya industri olahraga
- Masih adanya kesenjangan gender diberbagai bidang serta belum terpenuhinya hak-hak anak secara maksimal

- Meningkatnya kasus KDRT, trafiking, kekerasan pada anak, eksploitasi seksual komersial anak serta pekerjaan terburuk bagi anak. Data korban KDRT, Non KDRT serta trafficking yang telah ditangani PPT Jatim

Upaya pemecahan permasalahan

- Diperlukan dialog secara intensif dan berkelanjutan dengan ulama/ tokoh agama untuk meningkatkan manajemen dakwah baik dakwah yang bersifat monologis, dialogis, maupun textual.
- Perlu didirikan Pendidikan Tinggi Al-Alquran di Jawa Timur
- Perlu dibangun database guru madin di Jawa Timur
- Mendorong dan memotivasi perguruan tinggi agar segera mengurus akreditasi.
- Peningkatan pemberdayaan UPZ Prov. Jatim
 - Penghitungan kembali jumlah siswa, santri dan lembaga yang
 - melaksanakan wajar 9 tahun termasuk salafiyah, diniyah
 - Dana BOSDA di hitung berdasarkan 4 kategori (belum ada kepastian)
 - ❖ Berdasarkan rata rata (dihitug jumlah murid, guru negeri / swasta)
 - ❖ Berdasarkan rombongan belajar (dihitung jumlah murid dan guru swasta)
 - ❖ Berdasarkan guru swasta (dihitung berdasarkan guru swasta)
 - ❖ Berdasarkan jumlah murid (dihitung berdasarkan jumlah murid saja)
- Dilaksanakan sosialisasi masalah hak paten bidang seni dan budaya (agar kebudayaan kita tidak diambil oleh negara lain)
- Mengembangkan iklim yang kondusif bagi generasi muda dalam mengaktualisasikan segenap potensi, bakat, dan minat dengan

memberikan kesempatan dan kebebasan mengorganisasikan dirinya secara bebas dan merdeka sebagai wahana pendewasaan untuk menjadi pemimpin bangsa yang beriman dan bertakwa, berakhlak mulia, patriotis, demokratis, mandiri, dan tanggap terhadap aspirasi rakyat

- Pemberdayaan/pengembangan jiwa kewirausahaan pemuda terutama pada bidang agrobisnis dan agroindustri
- Memfasilitasi pemanfaatan potensi lokal yang berbasis pada pengembangan teknologi informasi dan komunikasi
- Mengintegrasikan upaya menumbuhkembangkan dan menyosialisasikan cinta budaya dan cinta tanah air dalam berbagai kegiatan, diantaranya dalam, Penyelenggaraan Parade Surya Senja
- Sosialisasi Undang-Undang No. 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional utamanya pada Bab IX tentang Prasarana dan Sarana Olahraga kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Badan Usaha yang bergerak pada bidang pembangunan perumahan
- Mengoptimalkan pembibitan atlet, melalui upaya :
 - Memperbanyak ruang terbuka hijau di perkotaan dan membantu pengadaan sarana olahraga di pedesaan;
 - Membudayakan olahraga rekreasi dan mendorong event-event olahraga massal.
 - Memfasilitasi mekanisme pembibitan dan pembinaan yang berkelanjutan
- Menstimulasi berkembangnya industri olahraga dg membudayakan olahraga agar semakin banyak orang gemar olahraga
- Menekan angka kelahiran dengan membumikan program KB terutama di daerah tapal kuda dan Madura belahan barat.

- Memperkuat jejaring dan koordinasi dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan, Kab/Kota, Badan/Dinas/Instansi serta organisasi peduli perempuan dan anak
- Menekan dan mencegah terjadinya KDRT, trafiking, kekerasan pada anak, eksploitasi seksual komersial anak serta pekerjaan terburuk bagi anak melalui sosialisasi pada masyarakat tentang :
 - UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
 - UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga;
 - UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

f) Penghargaan yang diterima baik Nasional maupun Provinsi

- Anugerah Parahita Eka Praya Tingkat Utama Ke VI

10. BIRO HUMAS DAN PROTOKOL SETDA PROVINSI JAWA TIMUR

1) Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan.

a) Tujuan

- Mendorong meningkatkan kualitas pelayanan publik, meningkatkan integritas dan sinergi pembangunan dari masyarakat dengan Pemerintah melalui berbagai media.
- Sebagai pedoman dalam menentukan arah, cita-cita dan tujuan organisasi yang disepakati bersama sehingga akan tercipta sistem kerja yang optimal, koordinatif, dan bersinergi dalam mencapai tujuan bersama.
- Sebagai Pusat Penyebarluasan informasi, mengumpulkan, menyimpan, menganalisis dan menyaring informasi baik untuk dipublikasikan maupun sebagai bahan penelitian dan bahan masukan kepada pimpinan untuk pengambilan keputusan.

b) Sasaran

- Meningkatnya hubungan timbal balik yang harmonis antara Pemerintah Propinsi dengan masyarakat.
- Meningkatnya kualitas kebijakan, program, kegiatan dan Hasil-hasil pembangunan kepada masyarakat sehingga lebih tepat sasaran
- Terciptanya basis data dan pusat informasi kebijakan, program dan kegiatan pembangunan serta hasil-hasilnya di Wilayah Propinsi Jawa Timur.

c) Pagu dan Realisasi Program

Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan dengan total anggaran sebesar Rp 800.000.000,00 dengan realisasi Rp. 729.453.000,00 atau sebesar 91,18% secara rinci realisasi perkegiatan yang terdiri dari realisasi anggaran dan capaian ukuran keberhasilan dapat dilihat pada Lampiran (Matrik 11 Kolom).

d) Hasil Pelaksanaan Program

- Tersedianya Komputer 10 buah, Printer 5 buah, Fax 1 buah, Laptop 1 buah, Mesin foto copy 1 buah, Hard disc 4 buah, UPS 4 buah, Filing Cabinet 1 buah, AC 1 buah, Lemari Es 1 buah, Radio Tape 1 buah.
- Tersedianya staf humas dan protokol yang berkualitas di SKPD dan Kab/Kota se Jatim sebanyak 120 orang
- Tersusunnya dokumen : LAKIP 2010 dan Renja 2012

2) Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi

a) Tujuan

- Terwujudnya peran humas dalam monitoring isu publik dan evaluasi bidang pemerintahan kemasyarakatan dan pembangunan.
- Terwujudnya hubungan yang harmonis antara Provinsi dan Kab/Kota.
- Terwujudnya pengembangan data base.
- Terwujudnya peran humas dibidang pelayanan informasi.
- Adanya informasi publik dan sistem mekanisme pelayanan informasi publik.

b) Sasaran

- Tersedianya informasi, sebagai bahan membuat kebijakan pimpinan.
- Terwujudnya publikasi pembangunan Jawa Timur.
- Tersedianya data base untuk peningkatan tersediannya data dan informasi
- Tersedianya informasi pembangunan dan pemerintahProv Jatim.
- Tersedianya data dan informasi serta terlayannya informasi publik.
- Terwujudnya peran humas dibidang pelayanan informasi dokumentasi dan audio visual.

c) Pagu dan Realisasi Program

Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi dengan total anggaran sebesar Rp 9.727.000.000,00 dengan realisasi Rp. 9.020.736.236,00 atau

sebesar 92,74% secara rinci realisasi perkegiatan yang terdiri dari realisasi anggaran dan capaian ukuran keberhasilan dapat dilihat pada Lampiran (Matrik 11 Kolom).

d) Hasil Pelaksanaan Program

- Mengklarifikasi, menindaklanjuti isu publik ke instansi terkait & menginformasikan hasil klarifikasi ke media.
- Tersedianya himpunan buku kliping bulanan sebanyak 1.440 buku dan buku kliping tahunan
- Tersedianya database untuk data dan informasi SKPD dan 38 Kab/Kota se Jatim, Termonitornya keg. Gub, Wagub, Sekda sebanyak 5.300. Di 14 media cetak, Terkafernya keg. Gubernur, Wagub, Sekda sebanyak 1.412, Terkafernya opini publik tentang Gub, Wagub, Sekda sebanyak 1.124 Terkafernya siaran pers Gub, Wagub, Sekda sebanyak 724
- Tersedianya dokumentasi dan penyebarluasan kegiatan/kebijakan pemprov Jatim melalui majalah Prasetya 18.000 ekp Advetorial 100 kali dan kalaedoskop 9 penayangan
- Tersedianya data dan informasi serta terlayannya informasi publik

3) Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah/ Sekretaris Daerah/ Asisten Sekda.

a) Tujuan

- Terwujudnya kelancaran kegiatan protokoler acara Kenegaraan dan acara Resmi.
- Terrwujudnya peningkatan pelayanan protokoler tamu VIP dan VVIP.

b) Sasaran dari Program

- Meningkatnya kegiatan pelayanan protokoler acara resmi.
- Terlaksananya kegiatan pelayanan tamu dalam pelayanan protokoler.

c) Pagu dan Realisasi Program

Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah/ Sekretaris Daerah/ Asisten Sekda dengan total anggaran sebesar Rp 6.631.000.000,00 dengan realisasi Rp. 5.782.199.119,00 atau sebesar 87,20% secara rinci realisasi perkegiatan yang terdiri dari realisasi anggaran dan capaian ukuran keberhasilan dapat dilihat pada Lampiran (Matrik 11 Kolom).

d) Hasil Pelaksanaan Program

- Terlayaninya kegiatan protokoler kenegaraan dan acara resmi Kdh/Wakil Kdh/ Sekda/Sekda sebanyak 1.360 kali
- Terpenuhinya pelayanan protokoler dalam penerimaan kunjungan Kenegaraan VIP sebanyak 120 kali dan VVIP sebanyak 4 kali.

11. BIRO ORGANISASI

1) Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah DAERAH

a) Tujuan

Peningkatan kapasitas kelembagaan Pemerintah Daerah

b) Sasaran

- Standar Kompetensi Jabatan, Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Sistem Mutu ISO
- Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Jawa Timur
- Penerapan dan Pengembangan Sistem Mutu ISO di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur
- Pembinaan Pengendalian Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten / Kota

c) Hasil Pelaksanaan

- Standar Kompetensi Jabatan 37 SKPD ; pembinaan teknis 23 SKPD yang disiapkan sebagai responden evaluasi kinerja oleh Kementrian PAN dan Reformasi Birokrasi : pendampingan ISO sebagai SKPD yang mempunyai URC di P2T dan audit internal-eksternal.
- Satu Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun 2010
- 17 Sertifikat ISO Team URS pada P2T
- Pembahasan BNP dan Satpol PP Provinsi Jawa Timur untuk disesuaikan dengan perubahan menjadi struktur yang baru.

d) Pagu dan Realisasi Program Triwulan IV

Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah memiliki anggaran sebesar Rp. 3.871.000.000 dengan realisasi Rp. 3.711.253.410 atau sebesar 95,87 % dapat dilihat pada Lampiran (Matrik 11 Kolom).

e) Permasalahan dan solusi

- Tidak seluruh SKPD mempunyai Tenaga Analisis Jabatan dan Tenaga Analisis Beban Kerja Penyusunan untuk menyusun Standar Kompetensi

Jabatan, dan mengantisipasi kekurangan tenaga tersebut dengan cara menyelenggarakan bimbingan teknis penyusunan Standar Kompetensi Jabatan

- Evaluasi akuntabilitas kinerja Instansi pemerintah yang dilakukan Kementerian PAN dan Reformasi Birokrasi terhdap SKPD yang dijelaskan responden evaluasi, tidak seluruhnya menguasai akuntabilitas kinerja, sehingga untuk mengatasi dilakukan bimbingan teknis akuntabilitas kinerja bagi responden evaluasi
- Beberapa SKPD yang mendapat kotribusi untuk mengembangkan Sistem Mutu ISO mendapat permasalahan dalam penggunaan kontribusi tidak digunakan untuk pengembangan Mutu ISO, sehingga anggaran APBD Tahun 2012 dialokasikan untuk mengembalikan kontribusi tersebut.

2) Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

a) Tujuan

Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

b) Sasaran

Pemeran pelayanan publik, pelayanan publik percontohan, penilaian Abdi Bhakti Tani, penilaian kompetensi pelayanan publik antar daerah, Citra Bhakti Abdi Negara

c) Hasil Pelaksanaan

Hasil pelaksanaan pembagunan berupa Pameran Pelayanan Publik, 11 Unit Pelayanan Publik Percontohan, 11 Unit Pelayanan Publik Abdi Bhakti Tani, 3 Unit Pelayanan Publik yang lolos uji kompetisi pelayanan publik antar daerah untuk diajukan mendapat Citra Bakti Abdi Negara.

d) Pagu dan Realisasi Program Triwulan IV

Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik memiliki anggaran sebesar Rp. 1.973.600.000 dengan realisasi Rp. 1.907.439.199 atau sebesar 96,65 % dapat dilihat pada Lampiran (Matrik 11 Kolom).

e) Permasalahan dan solusi

Mempertahankan hasil penilaian (menjadi juara) adalah tantangan bagi SKPD ataupun unit pelayanan di Kabupaten/Kota, sehingga diperlukan evaluasi dan perbaikan yang intens

3) PROGRAM PENERAPAN TATAKELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK

a) Tujuan

Penerapan Tata Kelola Pemerintahan yang baik

b) Sasaran

Gelar Budaya Kerja

c) Hasil Pelaksanaan

Hasil pelaksanaan pembangunan berupa Gelar Budaya Kerja 60 KBK (Kelompok Budaya Kerja) SKPD Provinsi dan Kabupaten/Kota

d) Pagu dan Realisasi Program Triwulan IV

Program Penerapan Tatakelola Pemerintahan Yang Baik memiliki anggaran sebesar Rp. 975.400.000 dengan realisasi Rp. 966.998.514 atau sebesar 99,14 % dapat dilihat pada Lampiran (Matrik 11 Kolom).

e) Permasalahan dan solusi

Tidak seluruh Kabupaten/Kota mengikuti KBK-nya (Kelompok Budaya Kerja) pada acara Gelar Budaya Kerja, karena anggaran yang terbatas, dengan demikian perlu menganggarkan di tahun mendatang, agar masing-masing Kabupaten/Kota dapat mengevaluasi prestasi KBK-nya.

12. BIRO UMUM SETDA PROVINSI JAWA TIMUR

1) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Negara.

a) Tujuan

Untuk meningkatkan pelayanan pendistribusian surat dan berita sandi.

b) Sasaran

Terdistribusinya surat dan berita sandi tepat waktu kepada tujuan alamat surat.

c) Pagu dan Realisasi Program

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Negara dengan pagu sebesar Rp. 913.995.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 898.451.822,00 (98,30%) yang secara rinci realisasi per kegiatan yang terdiri dari realisasi anggaran dan capaian ukuran keberhasilan dapat dilihat pada LAMPIRAN (Matrik 11 Kolom).

d) Hasil Pelaksanaan Pembangunan

Hasil dari pelaksanaan program/kegiatan ini adalah terdistribusinya surat = 100.514 surat dan berita lewat sandi = 28.340 berita

e) Permasalahan dan upaya pemecahannya

Permasalahannya

Belum seluruh pengelola surat memanfaatkan aplikasi Sistem Manajemen Surat (SMS) yang telah terkoneksi keseluruhan Biro, Ruang Asisten, Sekda, Wagub dan Gubernur.

Upaya pemecahannya

1. Melakukan pembinaan dan koordinasi kepada seluruh pengelola surat di Biro, Asisten, Sekda, Wagub dan Gubernur.
2. Meningkatkan sarana prasarana fasilitas pengelolaan surat secara online, pengadaan komputer, memperbaiki jaringan

2) Program Kearsipan.

a) Tujuan

Meningkatkan wawasan kearsipan bagi tenaga pengelola arsip Setda Provinsi Jawa Timur

b) Sasaran

Terselenggaranya 2 (dua) kegiatan pembinaan kearsipan bagi 80 orang tenaga kearsipan

c) Pagu dan Realisasi Program

Program Kearsipan dengan pagu sebesar Rp. 526.528.100,00 dengan realisasi sebesar Rp. 517.173.500,00 (98,22%) secara rinci realisasi per kegiatan yang terdiri dari realisasi anggaran dan capaian ukuran keberhasilan dapat dilihat pada LAMPIRAN (Matrik 11 Kolom).

d) Hasil Pelaksanaan Program /Kegiatan

Terselenggaranya pembinaan kearsipan untuk 80 orang

e) Permasalahan dan upaya pemecahannya

Permasalahan

Pekerjaan pengelolaan arsip kurang diminati oleh pegawai sehingga menimbulkan perasaan bosan.

Upaya pemecahannya

Perlu terus menerus dilakukan pembinaan

3) Program Pengelolaan Sumber Daya Manusia Aparatur

a) Tujuan

Peningkatan kinerja SDM

b) Sasaran Program

SDM tenaga sanditel

c) Pagu dan Realisasi Program

Program Pengelolaan Sumber Daya Manusia Aparatur dengan pagu sebesar Rp. 270.243.750,00 dengan realisasi sebesar Rp. 264.457.730,00 (97,86%) yang secara rinci realisasi per kegiatan yang terdiri dari realisasi

anggaran dan capaian ukuran keberhasilan dapat dilihat pada LAMPIRAN (Matrik 11 Kolom).

d) Hasil Pelaksanaan Program / Kegiatan

Terselenggaranya pembinaan sandiman untuk 40 orang

e) Outcomes

Meningkatnya kemampuan dibidang sandi dan telekomunikasi

f) Permasalahan dan Upaya Pemecahannya

Permasalahannya

Pembinaan kepegawaian Setda sejak tahun 2011 (adanya penataan organisasi) menjadi kewenangan Biro Organisasi

Upaya pemecahannya

Dilakukan koordinasi dengan Biro Organisasi dan pada tahun 2012 anggaran pembinaan kepegawaian lingkup Setda Provinsi Jawa Timur masuk dalam DPA Biro Organisasi.

13. SEKRETARIAT DPRD PROVINSI JAWA TIMUR

3) Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah

a) Tujuan

Tujuan Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah adalah mendukung peningkatan kinerja DPRD

b) Sasaran Program

Sasaran Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah adalah tersedianya dukungan bagi peningkatan kinerja DPRD

c) Pagu dan Realisasi Program

Pagu Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Program sebesar Rp. 102.295.105.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 77.913.275.991,00 (76,17 %) secara rinci realisasi per kegiatan yang terdiri dari realisasi anggaran dan capaian ukuran keberhasilan dapat dilihat pada LAMPIRAN (Matrik 11 Kolom).

d) Hasil Pelaksanaan Pembangunan

Hasil pelaksanaan pembangunan pada Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yaitu :

1. Dibahas dan ditetapkannya rancangan peraturan daerah menjadi peraturan daerah sejumlah 15 Raperda/Perda sebagaimana Tabel I

Tabel 4.95

Raperda Provinsi Jawa Timur Yang Telah Ditetapkan Menjadi Perda Tahun 2011

NO.	URAIAN	PENETAPAN	LEMBARAN DAERAH	PENGUSUL
1	Perda tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa	31 Januari 2011 Perda No. 1 Tahun 2011	16 April 2011 LD No. 1 Tahun 2011 Seri D Tambahan LD No.1	Eksekutif
2	Perda tentang Pembentukan Peraturan Daerah	31 Januari 2011 Perda No. 2 Tahun 2011	16 April 2011 LD No. 1 Tahun 2011 Seri D Tambahan LD No.2	Balegda

3	Perda tentang Tata Kelola Pupuk Organik	24 Maret 2011 Perda No. 3 Tahun 2011	16 Juli 2011 LD No.3 Tahun 2011	Komisi B
4	Perda tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan	14 April 2011 Perda No. 4 Tahun 2011	18 Juli 2011 LD No. 4 Tahun 2011 Seri D Tambahan LD No.4	Komisi E
5	Perda tentang Pengelolaan Sumberdaya Air	14 April 2011 Perda No.5 Tahun 2011	18 Juli 2011 LD No. 5 Tahun 2011 Seri D Tambahan LD No. 5	Komisi D
6	Perda tentang Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)	11 Agustus 2011 Perda No. 6 Tahun 2011	26 September 2011 Tahun 2011 LD No.6 Tahun 2011 Seri D	Komisi B
7	Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2010	27 Juli 2011 Perda No. 7 Tahun 2011	Tambahan LD No. 6	Eksekutif
8	Perda tentang Pelayanan Publik	24 September 2011 Perda No. 8 Tahun 2011	7 Oktober 2011 Seri D Tambahan LD No. 8	Komisi A
9	Perda tentang Perubahan APBD Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2011	20 Oktober 2011	-	Eksekutif
10	Perda tentang Retribusi Daerah	10 Nopember 2011	-	Eksekutif
11	Perda tentang Dana Cadangan	10 Nopember 2011	-	Eksekutif
12	Perda tentang APBD Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2012	10 Nopember 2011	-	Eksekutif
13	Perda tentang Perbaikan Gizi	14 Nopember 2011	-	Komisi E
14	Perda tentang Pengelolaan Air Tanah	14 Nopember 2011	-	Eksekutif
15	Perda tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur 2009-2029	29 Desember 2011	-	Eksekutif

2. Terselenggaranya kegiatan kunjungan kerja Alat Kelengkapan DPRD Provinsi Jawa Timur sejumlah 477 kegiatan sebagaimana Tabel II

Tabel 4.96
Rekapitulasi Kegiatan Kunjungan Kerja
Alat Kelengkapan DPRD Provinsi Jawa Timur Tahun 2011

No.	Pelaksana	Lokasi			Jumlah
		Luar Negeri	Luar Provinsi	Dalam Provinsi	
1	Komisi A s/d E	8	147	91	246
2	Badan Musyawarah	-	9	-	9
3	Badan Legislasi	-	10	3	13
4	Badan Anggaran	-	6	2	8
5	Panitia Khusus	-	16	1	17
6	Badan Kehormatan	-	5	-	5
7	Pimpinan DPRD	1	158	20	179
	Jumlah :	9	351	117	477

3. Terselenggaranya kegiatan Rapat-Rapat Paripurna DPRD Provinsi Jawa Timur sejumlah 113 kegiatan;
4. Terselenggaranya kegiatan peningkatan kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Jawa Timur sejumlah 231 kegiatan dengan komposisi kegiatan masing-masing fraksi sebagaimana Tabel III

Tabel 4.97
Rekapitulasi Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan
Anggota DPRD Provinsi Jawa Timur Tahun 2011

Nomor	Pelaksana Kegiatan	Jumlah
1	Fraksi Partai Demokrat	53
2	Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	38
3	Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa	31
4	Fraksi Partai GOLKAR	26
5	Fraksi Partai GERINDRA	14
6	Fraksi Partai Amanat Nasional	14
7	Fraksi Partai Keadilan Sejahtera	21
8	Fraksi Partai Kebangkitan Nasional Ulama	14
9	Fraksi Hanura Damai	9
10	Fraksi Persatuan Pembangunan Reformasi	11
	Total:	231

5. Terselenggaranya kegiatan Rapat Kerja (Raker), Audiensi, Hearing, Inspeksi Mendadak (Sidak) dan Sosialisasi Alat Kelengkapan DPRD Provinsi Jawa Timur sejumlah 271 kegiatan dengan rincian sebagaimana pada Tabel IV

Tabel 4.98

Rekapitulasi Kegiatan Raker, Audiensi, Hearing, Sidak, dan Sosialisasi Alat Kelengkapan DPRD Provinsi Jawa Timur Tahun 2011

No.	Pelaksana	Agenda					Jumlah
		Raker	Audiensi	Hearing	Sidak	Sosialisasi	
1	Komisi A s/d E	135	16	14	12	10	187
2	Badan Musyawarah	17	-	-	-	-	17
3	Badan Legislasi	15	-	-	-	-	15
4	Badan Anggaran	11	-	-	-	-	11
5	Panitia Khusus	12	-	-	-	-	12
6	Badan Kehormatan	11	-	-	-	-	11
7	Pimpinan DPRD	18	-	-	-	-	18
Jumlah :		219	16	14	12	10	271

6. Terselenggaranya penyebaran informasi peraturan perundang-undangan dan kegiatan DPRD kepada masyarakat, pemerintah daerah dan stake holder melalui media cetak (koran, majalah dan tabloid) dan elektronik (radio dan televisi) sejumlah 178 kegiatan

e) Permasalahan dan Upaya Pemecahannya

Permasalahan

Permasalahan yang ada pada Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah adalah :

- Penganggaran Belanja Puncak Kegiatan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD sudah diupayakan sesuai dengan Rencana Kerja DPRD Provinsi Jawa Timur, namun pelaksanaannya belum sepenuhnya sesuai dengan jadwal pelaksanaan kegiatannya, sehingga memungkinkan terjadi SiLPA;

- Pencairan anggaran Naskah Akademik, mengalami hambatan karena terjadinya persoalan pada pihak ketiga (Perguruan Tinggi/Lembaga Pengabdian Masyarakat) sehingga dalam proses pencairan dananya mengalami hambatan selanjutnya dilakukan evaluasi agar pelaksanaannya berjalan lancar

Sedangkan upaya pemecahannya

Permasalahan diatas akan disampaikan dan dibahas pada Rapat Pimpinan DPRD dengan Sekretaris Dewan

14. BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PROV. JATIM

1) Program Penelitian Dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi

a) Tujuan

- Melaksanakan, membina dan mengkoordinasikan penelitian dan pengembangan serta kajian dibidang Pemerintahan, Ekonomi dan Keuangan, SDA dan Teknologi serta Kemasyarakatan.
- Merumuskan hasil akhir penelitian dan pengembangan dalam bentuk rekomendasi yang disampaikan kepada Gubernur.
- Mempublikasikan hasil-hasil penelitian melalui jurnal penelitian, buletin dan Pusat Informasi Hasil Penelitian dan Teknologi.
- Menyampaikan hasil riset kepada Instansi terkait dan masyarakat yang memerlukan;

b) Sasaran

- Terlaksananya kegiatan penelitian dan pengembangan serta kajian yang implementatif, efektif dan profesional di bidang Pemerintahan, Ekonomi dan Keuangan, SDA dan Teknologi serta Kemasyarakatan.
- Terwujudnya rekomendasi kepada Gubernur melalui hasil penelitian dan pengembangan.
- Terpublikasikannya hasil penelitian dan pengembangan melalui jurnal penelitian, buletin dan Pusat Informasi Hasil Penelitian dan Teknologi.
- Termanfaatkannya hasil penelitian dan pengembangan oleh instansi terkait dan masyarakat yang memerlukannya.

c) Pagu dan Realisasi Program Triwulan IV

Program Penelitian Dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi memiliki anggaran sebesar Rp. 11.535.000.000,-dengan realisasi Rp. 11.474.169.685,- atau sebesar 99,47% secara rinci realisasi perkegiatan yang terdiri dari realisasi anggaran dan capaian ukuran keberhasilan dapat dilihat pada Lampiran (Matrik 11 Kolom).

d) Hasil Pelaksanaan Pembangunan

- Rekomendasi Hasil Penelitian dan pengembangan dibidang Pemerintahan, Ekonomi dan Keuangan, Sumberdaya Alam dan Teknologi, serta Kemasyarakatan sebagai masukan ilmiah dalam penyusunan kebijakan pemerintah (policy linked science)

Disamping Rekomendasi dan Hasil Penelitian, selama periode 2010 – 2011 beberapa program / kegiatan Litbang yang dapat dicatat keberhasilannya antara lain adalah :

- Hasil Kajian Ekonomi Carbon Trade sebagai Dasar Perhitungan Kompensasi Global Warming di Kawasan TAHURA R. SOERJO (berhasil disosialisasikan melalui Talk Show di JTV) Tahun 2010
- Disamping berhasil disosialisasikan tahun 2010 Hasil Kajian Ekonomi Carbon Trade sebagai Dasar Perhitungan Kompensasi Global Warming di Kawasan TAHURA R. SOERJO juga berhasil dibukukan dengan judul Ancaman Pemanasan Global terhadap Kehidupan Manusia dan dibeber buku tahun 2011
- Hasil Rekayasa Teknologi Komoditas Mangga Eksport Jawa Timur (Tahun ke 6/2010) berhasil dikembangkan berupa tanaman mangga dikebun/lahan percobaan Balai Benih Tanaman Hortikultura di Desa Pohjentrek Kabupaten Pasuruan
- Hasil Kajian Model Pemberdayaan Petani melalui Pengembangan Kawasan Agribis Terpadu di Jawa Timur (Tahun ke 2/2010) berhasil dikembangkan di Desa Kurung Kecamatan Kejayan Kabupaten Pasuruan tahun 2009 – 2010 berupa tanaman padi, jagung dan cabe merah besar serta peternakan sapi dan kambing dalam satu kawasan
- Hasil Rekayasa Teknologi Budidaya Jagung Ketan di Kepulauan Madura berhasil dibukukan dengan judul Budidaya dan Prospek

Pengembangan Jagung Ketan di Jawa Timur dan dibedah buku tahun 2011

- Pengembangan dari Hasil Rekayasa Teknologi Budidaya Jagung Ketan di Kepulauan Madura berhasil diuji tanam di Kecamatan Jrengik Kabupaten Sampang tahun 2011
- Hasil Kajian Teknologi Produksi Olahan Mangga Podang (Bubuk Buah, Puree dan Pasta Buah) pada Skala Industri berhasil dikembangkan dengan membuat alat teknologi tepat guna untuk memproduksi bubuk buah, puree dan pasta buah
- Hasil Kajian Daya Saing dan Dampak Kebijakan Pemerintah Dalam Rangka Menumbuh Kembangkan Investasi Agribis pedesaan berhasil dibukukan dan dibedah buku tahun 2011
- Hasil Kajian Peran PNS dalam Mewujudkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah berhasil dibukukan dan dibedah buku tahun 2011

e) Permasalahan dan Upaya Penyelesaian

Permasalahan

- Belum banyak hasil-hasil penelitian yang memberikan dampak langsung dalam pembuatan kebijakan atau untuk diaplikasikan;
- Belum optimalnya mekanisme intermediasi iptek yang menjembatani interaksi antara lembaga riset dengan kebutuhan pengguna;
- Belum adanya rasa percaya (trush) masyarakat maupun stakeholder terhadap hasil litbang;
- Adanya pesaing (lembaga non litbang) yang melaksanakan kegiatan litbang;

Upaya Penyelesaian

- Mempertajam/meningkatkan kualitas hasil penelitian melalui kerjasama dengan lembaga-lembaga penelitian perguruan tinggi atau dengan para pakar;

- Menciptakan inovasi-inovasi IPTEK secara profesional dan menjaga citra hubungan yang konsisten dengan kebutuhan pengguna.
- Membangun image kepada masyarakat bahwa pengembangan Hasil Litbang/IPTEK adalah suatu kebutuhan
- Meningkatkan sinergi antar lembaga litbang dan instansi terkait melalui Rapat Koordinasi litbang, kerjasama litbang , Forum Komunikasi kelitbangan, Seminar, Diskusi, Lokakarya atau Work Shop;

15. INSPEKTORAT

1) Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH

a) Tujuan

Mewujudkan sinergi pengawasan antara Pemerintah Pusat, Propinsi dan Kabupaten/Kota secara berkesinambungan dalam rangka penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Aparat Pengawasan Fungsional Pemerintah (APFP) Pusat, Propinsi, dan Kabupaten/Kota.

b) Sasaran

Terselenggaranya pengendalian internal dan pengendalian kebijakan Kepala Daerah

c) Pagu dan Realisasi

Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Kebijakan KDH sebesar Rp 3.100.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp **2.371.457.100,00 (76,50%)**, secara rinci realisasi per kegiatan yang terdiri dari realisasi anggaran dan capaian ukuran keberhasilan dapat dilihat pada LAMPIRAN (Matrik 11 Kolom).

d) Hasil Pelaksanaan program

- Terlaksananya 13 kali Rakorwasda (6 kali PDTLHP Reguler, 3 kali PDTLHP Khusus, 4 kali PDTLHP BPK/BPKP)
- Terlaksananya 1 kali Rakorwasnas (PDTLHP APIP Regional I) yang dilaksanakan oleh Itjen Kemendagri bekerjasama dengan seluruh Itjen Kementerian Teknis dan BPKP Pusat terkait pemantauan data tindak lanjut hasil pemeriksaan seluruh aparat pengawas intern pemerintah regional I.

e) Permasalahan dan Upaya Pemecahannya

Permasalahan :

- Seringnya terjadi pemeriksaan pada suatu entitas dari APFP lain pada waktu yang hampir bersamaan sehingga timbul kesan terjadi pemeriksaan yang berulang-ulang meskipun sasaran/ruang lingkup pemeriksaannya berbeda.
- Penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan oleh entitas/obyek pemeriksaan relatif lambat antara lain dikarenakan entitas/obyek pemeriksaan belum sepenuhnya memahami tata cara penyelesaian tindak lanjut. Selain itu juga dokumen yang diperlukan sebagai dasar untuk mendukung penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan tidak dapat dilengkapi mengingat kegiatannya terkait dengan pihak ketiga.

Upaya Pemecahan :

- Mengupayakan peningkatan koordinasi dengan APFP lain baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Kabupaten/Kota, diselenggarakan dalam bentuk penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan.
- Dilakukan upaya-upaya penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan secara terus-menerus baik melalui Rakorwas maupun monitoring dan evaluasi.
- Merubah pola penyerahan LHP, yaitu dengan cara mengundang langsung Kepala SKPD untuk menerima LHP dan dibuatkan Berita Acara Kesanggupan Penyelesaian Tindak Lanjut.

2) Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan

a. Tujuan

- Peningkatan kualitas SDM Aparat Pengawasan Fungsional Intern Pemerintah.

- Menciptakan aparatur pengawasan pemerintah yang profesional dan memenuhi kriteria nilai-nilai kepribadian, kedisiplinan, kejujuran dan obyektif.

b. Sasaran Program

Meningkatnya profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan

c. Pagu dan Realisasi Program

Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan sebesar Rp 2.278.169.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 1.756.486.800,00 (77,10%), secara rinci realisasi per kegiatan yang terdiri dari realisasi anggaran dan capaian ukuran keberhasilan dapat dilihat pada LAMPIRAN (Matrik 11 Kolom).

d. Hasil Pelaksanaan Pembangunan

- Bimtek pada APFP dengan prioriras pada materi pengelolaan keuangan daerah, pemeriksaan pengadaan barang dan jasa, serta teknologi informasi guna mengawal MoU dengan BPK RI serta mempertahankan opini WTP.

e. Permasalahan dan Upaya Pemecahannya

Permasalahan

- Kurang meratanya kualitas SDM Aparat Pengawasan dikarenakan perbedaan latar belakang pendidikan.
- Belum seluruh aparat pengawasan mendapatkan pendidikan Teknis Fungsional dalam bidang pengawasan.

Upaya Pemecahan :

- Meningkatkan kualitas aparat pengawasan melalui workshop, diklat, bimbingan teknis, dan pelatihan-pelatihan lainnya untuk menambah pengetahuan dan wawasan sebagai bekal dalam pelaksanaan tugas operasional pemeriksaan.

- Meningkatkan sarana dan prasarana yang mendukung mobilitas aparat pengawasan berupa penyediaan buku-buku ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan pemanfaatan teknologi informasi.

f. Penghargaan yang diterima baik Nasional maupun Provinsi

Profesionalisme Award 2010

Penghargaan dari Gubernur Jawa Timur tentang Profesionalisme Aparatur dan Perangkat Pemerintah Daerah Provinsi sesuai peraturan perundangan yang berlaku dan harapan masyarakat.

3) Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan

a. Tujuan

- Penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) secara cermat dan handal terhadap Obyek Pemeriksaan di lingkungan Pemerintah Propinsi Jawa Timur dan Pemerintah Kabupaten/Kota.
- Peningkatan penajaman sasaran pemeriksaan terutama terhadap bidang yang rawan terjadi pemborosan dan kebocoran anggaran serta penyimpangan lainnya dan pemantapan teknik, prosedur dan langkah kerja pemeriksaan dalam memacu terwujudnya pemerintahan yang efektif, efisien, transparan dan bertanggungjawab melalui peningkatan kualitas penyusunan dan pembuatan Laporan Hasil Pemeriksaan.

b. Sasaran

Terlaksananya penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan di Jawa Timur

c. Pagu dan Realisasi

Program Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan sebesar Rp 2.914.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 2.463.325.673,00 (84,53%), secara rinci realisasi per kegiatan

yang terdiri dari realisasi anggaran dan capaian ukuran keberhasilan dapat dilihat pada LAMPIRAN (Matrik 11 Kolom).

d. Hasil Pelaksanaan Pembangunan

Hasil pelaksanaan program/kegiatan adalah sebagai berikut :

- Terlaksananya rakorwasda dengan Inspektorat Kab/Kota se-Jawa Timur beserta Itjen Kementerian Teknis.
- Tersusunnya PKPT (Program Kerja Pemeriksaan Tahunan) Inspektorat Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2012.
- Terlaksananya EKPPD (Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah) atas LPPD TA 2010 bagi 38 Kab/Kota se-Jawa Timur (bekerjasama dengan BPKP Perwakilan Prov. Jawa Timur).
- Terlaksananya evaluasi atas LAKIP TA 2010 bagi 15 SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
- Terlaksananya evaluasi SPIP (Sistem Pengendalian Internal Pemerintah) atas 5 SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

e. Permasalahan dan Upaya Pemecahannya

Permasalahan

- Jumlah obyek pemeriksaan reguler dengan ruang lingkup sasaran pemeriksaan yang cukup luas serta banyaknya lembaga/instansi yang mempunyai tugas dan fungsi selaku Aparat Pengawasan Fungsional sehingga seringkali menimbulkan kesan adanya tumpang tindih pemeriksaan.
- Peningkatan mutu hasil pemeriksaan melalui paparan hasil temuan pemeriksaan.

Upaya Pemecahan

- Pemantapan penyusunan PKPT secara handal dan terpadu melalui pola bottom up dengan meningkatkan koordinasi antar APFP Pusat, Propinsi, dan Kabupaten/Kota.

- Pemantapan koordinasi antar petugas pemeriksa dalam penyusunan/pembuatan Laporan Hasil Pemeriksaan.

4) Program Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Pemerintah

a. Tujuan

- Terlaksananya pemeriksaan pada satuan kerja di lingkungan Pemerintah Propinsi Jawa Timur sesuai dengan PKPT yang telah ditetapkan.
- Peningkatan frekuensi pemeriksaan terhadap Obyek Pemeriksaan di lingkungan Pemerintah Propinsi Jawa Timur dan Pemerintah Kabupaten/Kota.
- Terlaksananya evaluasi kinerja pada SKPD Pemerintah Provinsi Jawa Timur

b. Sasaran

Terlaksananya pelaksanaan pengawasan dan akuntabilitas aparatur pemerintah di Jawa Timur

c. Pagu dan Realisasi Program

Program Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Pemerintah sebesar Rp 5.707.831.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 4.330.162.400,00 (75,86%), secara rinci realisasi per kegiatan yang terdiri dari realisasi anggaran dan capaian ukuran keberhasilan dapat dilihat pada LAMPIRAN (Matrik 11 Kolom).

d. Hasil Pelaksanaan Pembangunan

Hasil pelaksanaan program/kegiatan adalah sebagai berikut :

- Terlaksananya Pemjab (Pemeriksaan Akhir Masa Jabatan) Walikota/Bupati se-Jawa Timur yang berakhir masa pemerintahannya di tahun 2011.
- Terlaksananya reviu atas LKPD (Laporan Keuangan Pemerintah Daerah) Provinsi Jawa Timur sebelum diaudit oleh BPK Perwakilan Jawa Timur.

- Terlaksananya Validasi Aset milik Pemprov. Jatim pada 12 SKPD di lingkungan Pemprov. Jatim.
- Terlaksananya Pembinaan bagi inspektorat Kab/Kota se-Jawa Timur.
- Terlaksananya Pemeriksaan Reguler (PKPT/Program Kerja Pemeriksaan Tahunan TA 2011) di seluruh SKPD dan UPT di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
- Terlaksananya Pemeriksaan Khusus dan Kasus no Pemeriksaan Reguler (non PKPT).
- Terlaksananya Evaluasi atas UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di 38 Kab/Kota se-Jawa Timur.
- Terlaksananya Pemeriksaan Bansos, Dana Hibah program Gubernur yang didistribusikan di 38 Kab/Kota se-Jawa Timur.

e. Permasalahan dan Upaya Pemecahannya

Permasalahan

- Terbatasnya jumlah aparat pengawasan bila dibandingkan dengan jumlah obyek pemeriksaan reguler maupun khusus.
- Terbatasnya sarana dan prasarana yang tersedia.

Upaya Pemecahan

- Mengupayakan pemeriksaan tepat waktu yang telah dijadwalkan dan percepatan penyelesaian Laporan Hasil Pemeriksaan oleh petugas pemeriksa, disamping dilakukan pengangkatan staf Sekretariat sebagai bantuan tenaga operasional pemeriksaan.
- Peningkatan sarana dan prasarana serta penyediaan dana operasional Aparat Pengawasan Fungsional Intern Pemerintah.